

KETENAGAKERJAAN DALAM DATA

A hand holding a magnifying glass over a digital dashboard. The dashboard features a bar chart with blue bars labeled 004 TX through 012 TX, a line graph with a yellow line, and a pie chart. Various numerical data points are scattered across the interface, including 'Data: 678_678_678', '064_%', and several long numbers like '102544478', '201362223', '032659874', '425632189', '625333144', '530266980', '125489652', '502558791', '362514870', '326589325', '102544478', '201362223', '032659874', '425632189', '625333144', '712548215', '854678900', '936251447', '125014477', '362514870', '15', '354632350', '936251447', '125014477', '362514870', and '1A 02 582_25698'.

edisi 2

2024

KETENAGAKERJAAN DALAM DATA

EDISI 2 TAHUN 2024

ISBN : 978 – 623 – 97099 – 1 – 7

Naskah :
Bidang Pengelolaan Data Ketenagakerjaan

Desain Sampul dan Layout :
Bidang Pengelolaan Data Ketenagakerjaan

Penerbit:
Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan

Redaksi :
Jl. Jenderal Gatot Subroto
Kav. 51 Jakarta Selatan 12950
Telp : 021 – 5273609
Fax. : 021 – 5273609
Website : <https://satudata.kemnaker.go.id>
Email : sdk@kemnaker.go.id

Hak cipta dilindungi undang – undang
Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan

TIM PENYUSUN

Koordinator : Franciscus Anton Wirawan, S.Si., M.Si
Pengolah data : Zulfiyandi, S,E
Roselina Yolanda, S.Si
Ainul Fatwa Khoiruroh, S.Si
M. Zaini, S.Stat
Devi Andrian, S.Stat
Khairina Syafitri, S.Kom
Mastiur Herawati Napitupulu, S.Kom

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Buku Ketenagakerjaan Dalam Data (KDD) edisi 2 Tahun 2024 ini. Buku KDD merupakan penyajian data ketenagakerjaan yang dipublikasikan secara semesteran untuk memotret dinamika ketenagakerjaan secara priodik dan berkesinambungan. Publikasi buku KDD dua kali dalam setahun ini juga merupakan upaya Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan dalam memenuhi amanat Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 Tahun 2020 Tentang Satu Data Ketenagakerjaan.

Buku KDD ini menyajikan data sektoral ketenagakerjaan Semester 1 Tahun 2024 dan data Ketenagakerjaan Umum periode Februari 2024. Data ketenagakerjaan umum diolah dan bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan data sektoral ketenagakerjaan diolah dan bersumber dari hasil kompilasi administratif laporan penyelenggaraan fungsi ketenagakerjaan oleh produsen data ketenagakerjaan, baik internal maupun eksternal Kemnaker dengan periode laporan sampai dengan Semester 1 Tahun 2024.

Publikasi Buku KDD ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dalam melihat dan menggambarkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Semoga buku KDD ini juga dapat memberikan manfaat yang lebih kepada pengguna data ketenagakerjaan baik itu pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat terutama bagi mereka yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam kondisi ketenagakerjaan Indonesia.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku KDD ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyusunan buku KDD yang lebih baik pada edisi-edisi selanjutnya.

Jakarta, November 2024

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kompleksitas urusan di bidang ketenagakerjaan menuntut akurasi perencanaan, evaluasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan. Karena itu, sangat penting bagi kita menerapkan budaya literasi data dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan.

Budaya literasi data adalah budaya yang terkait dengan kemampuan membaca, menganalisis dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data yang ada. Budaya yang menghendaki keterukuran yang *fact-based* atau berdasarkan data dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengkritisi setiap keputusan yang diambil.

Syarat mutlak yang harus dipenuhi agar budaya literasi data dapat diterapkan dalam pembangunan ketenagakerjaan yakni adanya dukungan ketersediaan data ketenagakerjaan yang berkualitas, yaitu akurat, relevan, up to date, lengkap, dan terpadu. Data ketenagakerjaan yang berkualitas menjadi sangat penting karena data sejatinya merepresentasikan fakta atau keadaan yang sebenarnya dari suatu kejadian.

Data dapat diolah menjadi informasi yang memberikan pengetahuan, dan jika disajikan secara periodik dan berkala maka akan didapatkan gambaran historis atau sejarah dari suatu fakta. Yang tentu saja akan sangat penting dan berguna untuk pengampilan kebijakan dan keputusan dalam membuat suatu perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan, serta melakukan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan.

Untuk itu, sebagai salah satu upaya dalam menyediakan data ketenagakerjaan yang lengkap dan disajikan secara periodik dan berkala, Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan menyusun dan menerbitkan Buku Ketenagakerjaan Dalam Data (KDD).

1.2 Tujuan

Buku Ketenagakerjaan Dalam Data disusun dan disajikan dengan tujuan untuk:

- a. Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang relevan, komprehensif, berkualitas, dan terbaru (up to date) secara periodik dan berkala.
- b. Sumber referensi pengambilan kebijakan dan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang ketenagakerjaan.
- c. Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 tahun 2020 Tentang Satu Data Ketenagakerjaan, khususnya pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan “Penyajian Data dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali setahun dan harus dalam bentuk sederhana agar mudah dimengerti.
- d. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pembangunan ketengakerjaan.

1.3 Ruang Lingkup

Buku KDD ini merupakan salah satu bentuk penyediaan data ketenagakerjaan dengan format buku dan diterbitkan secara periodik dua kali setahun. Lingkup data yang disajikan mencakup:

- Data Ketenagakerjaan Umum
- Data Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- Data Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Data Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3

1.4 Metodologi

1.4.1 Jenis Data

Secara garis besar, ada dua jenis data yang disajikan dalam buku KDD ini, yaitu:

- 1) Data Ketenagakerjaan Umum, adalah data ketenagakerjaan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, dan bersifat makro. Termasuk dalam data jenis ini yaitu: Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, Penduduk Yang Bekerja, dan Pengangguran Terbuka.

- 2) Data Ketenagakerjaan Khusus, adalah data ketenagakerjaan yang memiliki ciri-ciri sektoral dan bersifat mikro atau khusus dalam arti data tersebut dihasilkan dari proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan. Termasuk data dalam jenis ini yaitu data terkait substansi: Pelatihan vokasi dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

1.4.2 Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data

Sumber data ketenagakerjaan dibedakan menjadi dua sesuai dengan jenis data ketenagakerjaan, yaitu:

- 1) Data Ketenagakerjaan umum bersumber dari data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sakernas dilakukan dengan cara pencacahan terhadap sampel terpilih dan diselenggarakan oleh BPS dua kali dalam setahun, yakni periode Februari dan Periode Agustus. Hasil Sakernas periode Februari hanya dapat dilakukan estimasi sampai dengan level provinsi dan berita resminya dirilis pada bulan Mei. Sedangkan hasil Sakernas periode Agustus dapat dilakukan estimasi sampai dengan level kabupaten/kota dan berita resminya dirilis pada bulan November. Dalam buku KDD ini, yang digunakan adalah hasil Sakernas Februari 2024.
- 2) Data ketenagakerjaan khusus bersumber dari produsen data ketenagakerjaan, yaitu unit teknis Kementerian Ketenagakerjaan serta sumber lainnya seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Data ini dikumpulkan dengan cara kompilasi administrasi produk data – data ketenagakerjaan. Dalam buku KDD edisi kedua Tahun 2024, secara umum penyajian data dengan titik *cut off* semester 1 Tahun 2024.

1.4.3 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan dua tools. Yang pertama, data ketenagakerjaan umum atau data hasil Sakernas Februarin2024 diolah menggunakan paket program IBM SPSS Statistics. Sedangkan data ketenagakerjaan khusus yang berupa produk kompilasi administratif diolah dengan menggunakan paket program Microsoft Excel.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Ini adalah metode statistik yang berhubungan dengan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan maksud agar data menjadi lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna. Melalui metode ini, data ketenagakerjaan yang sudah terkumpul dideskripsikan atau dibuat gambaran umum tentang karakteristiknya. Ukuran-ukuran yang dapat disajikan dengan metode statistik deskriptif ini berupa frekuensi, pemusatan data, penyebaran data, kecenderungan suatu gugus data, dan lain-lain. Agar lebih mudah dibaca dan dipahami, maka data diringkas dalam bentuk tabulasi dan/atau grafik/diagram.

1.4.5 Ukuran Presisi Estimasi

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, data ketenagakerjaan umum yang disajikan dalam buku KDD ini merupakan hasil suatu kegiatan survei, yaitu Sakernas. Dalam survei, pendataan atau pencacahan dilakukan terhadap sampel yang sebelumnya dipilih dengan menggunakan metode sampling tertentu. Hasil pencacahan terhadap sampling kemudian digunakan untuk melakukan estimasi terhadap angka populasi.

Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat presisi suatu estimasi relatif terhadap estimasinya. Dalam hal ini, ukuran yang digunakan adalah Relatif Standar Error (RSE). Kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan. Menurut Aryago Mulia dkk (2008), keputusan keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari kondisi berikut:

- Nilai $RSE \leq 25\%$, hasil estimasi dianggap akurat dan bisa digunakan
- $25\% < \text{nilai } RSE \leq 50\%$, akurasi hasil estimasi tingkat sedang dan perlu kehati-hatian jika digunakan

- Nilai RSE > 50%, hasil estimasi tidak akurat sehingga tidak layak digunakan. Dan harus digabungkan dengan estimasi lain untuk mendapatkan estimasi dengan nilai RSE ≤ 25%

1.5 Definisi Operasional

a

- Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) : tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di bidang K3
(Permenaker No.33 tahun 2016)
- Anak : setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun
(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
- Anak yang bekerja : .anak-anak yang terlibat dalam aktivitas apa saja di dalam proses produksi, sesuai SSN, paling sedikit satu jam dalam periode referensi
(Konsep ILO)
.anak-anak umur 15-17 tahun yang masuk dalam kategori penduduk yang bekerja
(Sakernas Agustus 2019)
- Angkatan Kerja : penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
(<http://bps.go.id>)
- Arbiter : seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- Asosiasi Pengusaha : organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk kepentingan pengusaha
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)

B

- Badan : Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu
(Undang-undang No. 18 Tahun 2017)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) : Badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
(Undang-undang No. 18 Tahun 2017)

Badan Pusat Statistik (BPS)	: Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk melaksanakan survei atau sensus (https://www.bps.go.id)
Bukan Angkatan Kerja (BAK)	: Penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya (https://www.bps.go.id)
Bekerja	: Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar
Bursa Kerja Khusus	: termasuk kelompok penduduk yang bekerja (https://www.bps.go.id) Unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan Lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya. (Permenaker No.39 Tahun 2016)
c	
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	: Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Undang-undang No. 18 Tahun 2017)
d	
Dinas Provinsi	: instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi (Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
Dinas Kabupaten/Kota	: instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota (Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
Data	: a. Informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi (Permenakertrans No.1 Tahun 2014) b. Catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019)
Data statistik	: Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019)
e	
-	

- f
 Fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh : fasilitas kesejahteraan bagi pekerja/buruh yang disediakan oleh perusahaan
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- g
 Golongan : uraian lebih lanjut dari golongan pokok data dan informasi ketenagakerjaan
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
 Golongan Pokok : tingkat pengelompokan yang paling luas dari golongan klasifikasi dari jenis data dan informasi ketenagakerjaan
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- h
 Hubungan Kerja : Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah *(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)*
 Hubungan Industrial : suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
 Hakim Ad-Hoc : Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- i
 Instruktur : Seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
 Iuran : Sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan
<https://bpjsketenagakerjaan.go.id>
- j
 Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan seminggu yang lalu : Jumlah kerja mereka yang bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Klasifikasi jumlah jam kerja seluruh pekerjaan seminggu yang lalu dibagi menjadi 0 (sementara tidak bekerja, 1-34 jam, 35 -40 jam (Jam kerja normative berdasarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 40 jam per minggu), 41 – 48 jam, > 48 jam (ambang batas untuk mengklasifikasikan jam kerja

	berlebih menurut Konvensi ILO 1919 (No.1) dan 1930 (No.30)) (https://www.bps.go.id)
Jenis Pekerjaan/Jabatan	: Macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau sementara tidak bekerja (Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
Jaminan Hari Tua (JHT)	: manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap (https://bpjsketenagakerjaan.go.id)
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	: manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (https://bpjsketenagakerjaan.go.id)
Jaminan Kematian (JK)	: manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja (https://bpjsketenagakerjaan.go.id)
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	: Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional No. 1 Tahun 2016)
Jaminan Pensiun (JP)	: jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia (https://bpjsketenagakerjaan.go.id)
Jaminan sosial	: salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (https://bpjsketenagakerjaan.go.id)
k	
Karakteristik Data Ketenagakerjaan	: Ciri-ciri khusus yang melekat pada data ketenagakerjaan menurut substansinya (Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
Kartu Prakerja	: Program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi (https://www.prakerja.go.id)
Klasifikasi Data Ketenagakerjaan	: pengelompokan data secara sistematis ke dalam golongan pokok, golongan, sub golongan dan kelompok berdasarkan substansi ketenagakerjaan sehingga terdefiniskan dengan
Klaim	: jelas (Permenakertrans No.1 Tahun 2014) tuntutan pengakuan atas suatu fakta seseorang berhak atas sesuatu

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Permenaker No.33 tahun 2016)
Kompetensi kerja	: kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (Undang-undang No.13 Tahun 2003)
Kecelakaan Kerja	: Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui
Kesejahteraan Buruh/Pegawai	: suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat (Undang-undang No.13 Tahun 2003)
Ketenagakerjaan	: Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Konsiliator	: Seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
Lanjut Usia	: Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas (Undang-undang No. 13 Tahun 1998)
Lembaga Pelatihan Kerja	: Instansi pemerintah, badan, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja (Permenaker No. 17 Tahun 2016)
Lapangan Usaha	: bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja (Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
Lembaga Kerja Sama Bipartit	: forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Lembaga kerja sama tripartite	: Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	: organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>)
Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	: Lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri (<i>Permenaker No.39 Tahun 2016</i>)
m	
Mogok Kerja	: Badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan pekerja rumah tangga (<i>Permenaker No.2 Tahun 2015</i>)
Mediator	: Tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>)
	: pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (<i>Permenakertrans No.1 Tahun 2014</i>)
n	
Notifikasi	: Persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan Itas (<i>Permenaker No. 10 Tahun 2018</i>)
o	
-	
p	
Padat Karya	: Kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi local dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli masyarakat
Pekerja/Buruh	: Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>)
Pekerjaan Layak	: Kondisi pekerjaan yang memenuhi aspirasi orang-orang dalam kehidupan kerja, termasuk mengenai peluang pekerjaan yang produktif, pendapatan yang adil, keamanan di tempat kerja, perlindungan sosial bagi keluarga, prospek yang lebih baik untuk pengembangan pribadi dan integrasi sosial, kebebasan untuk mengekspresikan keprihatinan, dan partisipasi dalam membuat keputusan yang mempengaruhi

	kehidupan mereka, serta mengenai kesetaraan kesempatan dan perlakuan untuk semua wanita dan pria. (https://www.ilo.org/global/topics/decentwork/lang—en/index.htm)
Pekerja Migran Indonesia	: Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Undang-undang No. 18 Tahun 2017)
Pekerja Informal	: Pekerjaan diluar hubungan kerja
Pelatihan Kerja	: Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Pelatihan Tanggap Covid-19	: Program pelatihan yang diarahkan pada kegiatan untuk memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 seperti pelatihan memasak, pembuatan APD (hazmat), masker, pelindung muka (face shield), hand sanitizer, disinfektan, instalasi wastafel dan pelatihan lainnya. Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Pemuda	: mereka yang berusia 15 – 24 tahun (<i>International Labour Organization</i>)
Penduduk Usia Kerja	: Penduduk berumur 15 tahun ke atas (http://bps.go.id)
Penganggur Terbuka	: Mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja
Pengantar Kerja	(http://bps.go.id) Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja (<i>PermenpanRB No. 5 Tahun 2014</i>)
Pengawasan Ketenagakerjaan	: Kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Penyandang Disabilitas	: Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warge negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Undang – Undang No.8 Tahun 2016)
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	: Pegawai negeri sipil yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan perundang-

	undangan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (<i>Permenakertrans No.1 Tahun 2014</i>)
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Khusus	: Pegawai teknis berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (<i>Permenakertrans No.1 Tahun 2014</i>)
Penindakan pelanggaran	: serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam mengusut pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (<i>Permenakertrans No.1 Tahun 2014</i>)
Pengusaha	: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>)
Penyandang Disabilitas	: Kesulitan/gangguan dalam melihat, mendengar, berjalan/naik tangga, menggunakan/menggerakkan jari/tangan, berbicara dan atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain, serta kesulitan/gangguan lainnya
Perjanjian Kerja	(Kuesioner Survei Angkatan Kerja Nasional) Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>)
Perusahaan	: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>) Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>Peraturan BP2MI No.3 Tahun 2021</i>)
Pemagangan	: Bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa

	di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>)
Peraturan Perusahaan	: Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>)
Perjanjian kerja Bersama	: Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>)
Perselisihan hubungan industrial	: Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>)
Pemutusan hubungan kerja	: Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>)
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	: Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>Undang-undang No. 18 Tahun 2017</i>)
Produktivitas	: Rasio antara hasil atau luaran (output) dengan masukan yang dipakai (input) (<i>Permenakertrans No.1 Tahun 2014</i>)
Produktivitas Tenaga Kerja	: rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi (<i>Permenakertrans No.1 Tahun 2014</i>)
q	
-	
r	
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	: Rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk (<i>Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018</i>)
Remitansi	

Layanan jasa pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dari Indonesia kepada penerima di luar negeri maupun sebaliknya

s

- Serikat pekerja/serikat buruh : Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
- Sub golongan : Uraian lebih lanjut dari golongan data dan informasi ketenagakerjaan
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- Status pekerjaan : Kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan
(<http://bps.go.id>)
- Standardisasi Kompetensi Kerja : Proses merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standar kompetensi kerja
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) : rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)

t

- Tenaga kerja : Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
- Tenaga kerja asing : Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia
(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
- Tenaga kerja berkeahlian : Tiga negara yang tergabung dalam IMT-GT yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand menyepakati menggunakan asumsi yang didekati dari jenis pekerjaan untuk mengkatagorikan tenaga kerja berdasarkan skill yang dimiliki. Mereka yang bekerja sebagai Manager, Profesional serta Teknisi dan Asisten Profesional digolongkan sebagai Skilled Labor. Sementara itu, yang masuk ke dalam kategori *Semi-skilled* adalah mereka yang memiliki jenis pekerjaan sebagai Tenaga Tata Usaha, Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan, Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pekerja Pengolahan, Kerajinan dan YBDI serta Operator dan Perakit Mesin. Untuk *Basic-skilled*, adalah mereka yang memiliki jenis pekerjaan sebagai Pekerja Kasar.
- Tenaga Kerja Mandiri
- Tenaga Kerja Sukarela

	Suatu program kegiatan pengembangan dan perluasan kerja yang dilakukan kepada masyarakat yang telah memiliki embrio usaha secara berkelompok Tenaga kerja yang melakukan pendampingan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri terkait dengan perluasan kesempatan kerja
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	: persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (http://bps.go.id)
Tenaga Kerja Pendamping	: Tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian (Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018)
u Upah	: Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
v - w	
Wajib lapor ketenagakerjaan	: Laporan perusahaan secara tertulis setiap mengangkat, memindahkan menghentikan, menjalankan kembali tenaga kerja kepada pejabat yang ditunjuk (Undang-undang No. 7 Tahun 1981)
Y - Z -	

BAB II

DATA BIDANG PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

1. Data Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan

Tabel 2.1
Jumlah SKKNI yang ditetapkan menurut Lapangan Usaha dan Status
s.d Triwulan III Tahun 2024

LAPANGAN USAHA	STATUS SKKNI		TOTAL
	BERLAKU	DICABUT	
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	76	14	90
02. Pertambangan dan Penggalian	58	23	81
03. Industri Pengolahan	156	25	181
04. Pengadaan Listrik, Gas	16	7	23
05. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21	9	30
06. Konstruksi	143	19	162
07. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12	6	18
08. Transportasi dan Pergudangan	28	3	31
09. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8	5	13
10. Informasi dan Komunikasi	46	15	61
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	24	14	38
12. Real Estat	1	1	2
13. Jasa Perusahaan	208	54	262
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7	1	8
15. Jasa Pendidikan	11	4	15
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21		21
17. Jasa Lainnya	91	43	134
Tidak Teridentifikasi	1		1
Total	928	243	1,171

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan III Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

2. Data Program dan Materi Pelatihan

Tabel 2.2
Jumlah Program dan Materi Pelatihan yang masih aktif menurut Kejuruan dan Metode Pelatihan
s.d Triwulan III Tahun 2024*

KEJURUAN	METODE PELATIHAN			TOTAL
	BLENDED	OFFLINE	ONLINE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
AGRIBISNIS	4	13	3	20
BABY SITTER	3	1		4
BANGUNAN	34	83	19	136
BISNIS DAN MANAJEMEN	107	124	208	439

KEJURUAN	METODE PELATIHAN			TOTAL
	BLENDED	OFFLINE	ONLINE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DESAIN BATIK		22	1	23
ELDERLY CARETAKER	6	3	6	15
FAMILY COOK		1		1
FAMILY DRIVER	3	6		9
GARDENER		2		2
GARMEN APPAREL	35	150	8	193
HOUSEKEEPING	7	10	6	23
INDUSTRI KREATIF	6	78	12	96
METODOLOGI PELATIHAN	3	6	4	13
PARIWISATA	84	184	47	315
PENGEMBANGAN SOSIAL MASYARAKAT	1			1
PENGOLAHAN KULIT		1		1
PERIKANAN	9	32	17	58
PERTANIAN	30	82		112
PROCESSING	16	72	7	95
PRODUKTIVITAS	17	9	8	34
REFRIGERATION	18	38		56
TATA BOGA	9	12	11	32
TATA BUSANA	38	25	10	73
TATA KECANTIKAN	66	101	38	205
TEKNIK ELEKTRONIKA	32	59	3	94
TEKNIK LAS	29	133		162
TEKNIK LISTRIK	19	58	8	85
TEKNIK MANUFAKTUR	18	63	11	92
TEKNIK OTOMOTIF	35	131	55	221
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	194	205	402	801
Tidak Teridentifikasi	59	77	60	196
Total	882	1,781	944	3,607

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan III Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

Program pelatihan yang aktif didapat dari program pelatihan dengan status terbit

3. Data Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Tabel 2.3
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Terverifikasi menurut Provinsi dan Tipe Lembaga
s.d Semester I Tahun 2024*

PROVINSI	TIPE LEMBAGA							TOTAL
	BLK KOMUNITAS	BLK UPTD	UPT BPVP	BLKLN	LEMBAGA PELATIHAN K/L	LPK SWASTA	SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ACEH	77	11	1			32		121
SUMATERA UTARA	104	12	1	1		110		228
SUMATERA BARAT	78	14	1			65		158
RIAU	40	9				11		60
JAMBI	81	7				26		114
SUMATERA SELATAN	85	12				46		143
BENGKULU	15	6				20		41
LAMPUNG	108	4				123		235
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	12	2	1			7		22
KEPULAUAN RIAU	2	2				43	1	48
DKI JAKARTA	10	8		4		128		150
JAWA BARAT	703	20	4	25	2	464		1,218
JAWA TENGAH	754	34	2	31	2	276		1,099
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	53	5				113		171
JAWA TIMUR	791	28	2	19	2	272	2	1,116
BANTEN	162	6	1			89		258
BALI	17	7				111		135
NUSA TENGGARA BARAT	81	10	1	1		100		193
NUSA TENGGARA TIMUR	44	5	1	2		25		77
KALIMANTAN BARAT	53	6				19		78
KALIMANTAN TENGAH	7	10				17		34
KALIMANTAN SELATAN	24	10				36		70
KALIMANTAN TIMUR	19	4	1			33		57
KALIMANTAN UTARA	12	2				5		19
SULAWESI UTARA	15	1				25		41
SULAWESI TENGAH	17	8	1			21		47
SULAWESI SELATAN	103	17	3			119		242
SULAWESI TENGGARA	15	5	2			28		50
GORONTALO	4	5				12		21
SULAWESI BARAT	29	1	1			12		43
MALUKU	4	3	1		1	13		22
MALUKU UTARA	10		1			10		21
PAPUA BARAT	3	1						4
PAPUA BARAT DAYA	5		1			1		7
PAPUA	3	3				5		11

PROVINSI	TIPE LEMBAGA							TOTAL
	BLK KOMUNITAS	BLK UPTD	UPT BPVP	BLKLN	LEMBAGA PELATIHAN K/L	LPK SWASTA	SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PAPUA SELATAN	2	1						3
PAPUA TENGAH	4					4		8
Total	3,546	279	26	83	7	2,421	3	6,365

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester I Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

Tabel 2.4
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Terverifikasi menurut Provinsi dan Status Akreditasi s.d Semester I Tahun 2024*

PROVINSI	Status Akreditasi		TOTAL
	Terakreditasi	Belum Terakreditasi	
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	17	104	121
SUMATERA UTARA	39	189	228
SUMATERA BARAT	48	110	158
RIAU	7	53	60
JAMBI	13	101	114
SUMATERA SELATAN	29	114	143
BENGKULU	7	34	41
LAMPUNG	47	188	235
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4	18	22
KEPULAUAN RIAU	22	26	48
DKI JAKARTA	50	100	150
JAWA BARAT	244	974	1,218
JAWA TENGAH	173	926	1,099
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	48	123	171
JAWA TIMUR	134	982	1,116
BANTEN	55	203	258
BALI	63	72	135
NUSA TENGGARA BARAT	69	124	193
NUSA TENGGARA TIMUR	21	56	77
KALIMANTAN BARAT	11	67	78
KALIMANTAN TENGAH	12	22	34
KALIMANTAN SELATAN	16	54	70
KALIMANTAN TIMUR	26	31	57
KALIMANTAN UTARA	1	18	19
SULAWESI UTARA	9	32	41
SULAWESI TENGAH	10	37	47

PROVINSI	Status Akreditasi		TOTAL
	Terakreditasi	Belum Terakreditasi	
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI SELATAN	73	169	242
SULAWESI TENGGARA	21	29	50
GORONTALO	3	18	21
SULAWESI BARAT	3	40	43
MALUKU	13	9	22
MALUKU UTARA	5	16	21
PAPUA BARAT		4	4
PAPUA BARAT DAYA	1	6	7
PAPUA	5	6	11
PAPUA SELATAN		3	3
PAPUA TENGAH	1	7	8
TOTAL	1,300	5,065	6,365

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester I Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

4. Data Talent Corner di UPT BPVP

Tabel 2.5

Jumlah Peserta Talent Corner di UPT BPVP menurut Provinsi dan Jenis Program Talent Semester I Tahun 2024*

No.	Provinsi /UPT BPVP	Alamat Lengkap	Jenis Program Talent		Total
			Talent Class	Talent Talks	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sumatera Barat	Jl. Sungai balang, bandar buat, lubuk kilangan, kota padang, provinsi sumatera barat, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Kota Padang, Sumatera Barat 25157	45		45
	BPVP Padang		45		45
2	Sumatera Utara	Jl. Gatot subroto km 7,8 medan, sumatera utara, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Kota Medan, Sumatera Utara 20127		20	20
	BBPVP Medan			20	20
Total			45	20	65

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester I Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

* data diolah berdasarkan BNBA yang diterima

Tabel 2.6
Jumlah Peserta Talent Corner di UPT BPVP menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Semester I Tahun 2024*

No.	Provinsi /UPT BPVP	Alamat Lengkap	Jenis Kelamin		Tidak Teridentifikasi	Grand Total
			Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sumatera Barat	Jl. Sungai balang, bandar buat, lubuk kilangan, kota padang, provinsi sumatera barat, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Kota Padang, Sumatera Barat 25157	19	25	1	45
	BPVP Padang		19	25	1	45
2	Sumatera Utara	Jl. Gatot subroto km 7,8 medan, sumatera utara, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Kota Medan, Sumatera Utara 20127	10	10		20
	BBPVP Medan		10	10		20
Grand Total			29	35	1	65

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester I Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

* data diolah berdasarkan BNBA yang diterima

5. Data Peserta Pemagangan Dalam Negeri

Tabel 2.7
Jumlah Peserta Pemagangan Dalam Negeri Menurut Provinsi dan Sumber Anggaran
Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024*

PROVINSI	SUMBER ANGGARAN				
	DEKONSENTRASI	DESTINASI PARIWISATA SUPER PRIORITAS (DPSP)	MANDIRI	APBD	APBN (DIT. BINA LAVOGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ACEH	197		9		
SUMATERA UTARA	279	90	27		
SUMATERA BARAT	179		7		
RIAU	157		7		
JAMBI	189		5		
SUMATERA SELATAN	195		274		
BENGKULU	183		10		
LAMPUNG	191		16		
KEP. BANGKA BELITUNG	175		10		
KEP. RIAU	206		4		
DKI JAKARTA	249		10,850		100
JAWA BARAT	281		947		

PROVINSI	SUMBER ANGGARAN				
	DEKONSENTRASI	DESTINASI PARIWISATA SUPER PRIORITAS (DPSP)	MANDIRI	APBD	APBN (DIT. BINA LAVOGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JAWA TENGAH	273	80	61		
DI YOGYAKARTA	219	70	25		
JAWA TIMUR	271		77		
BANTEN	241		542		
BALI	211		4		
NUSA TENGGARA BARAT	211	100	8		
NUSA TENGGARA TIMUR	209	80	3		
KALIMANTAN BARAT	193		3		
KALIMANTAN TENGAH	187		9		
KALIMANTAN SELATAN	192		5	30	
KALIMANTAN TIMUR	203		19		
KALIMANTAN UTARA	108		2		
SULAWESI UTARA	226	80	3		
SULAWESI TENGAH	183		6		
SULAWESI SELATAN	189		24		
SULAWESI TENGGARA	183		10		
GORONTALO	173		7	50	
SULAWESI BARAT	179		4		
MALUKU	194		3		
MALUKU UTARA	184		8		
PAPUA BARAT	195		5		
PAPUA	192		10		
Total	6,897	500	13,004	80	100
Grand Total	20,581				

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan III Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

6. Data Penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri

Tabel 2.8
Jumlah Penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri Menurut Provinsi
s.d Triwulan III Tahun 2024*

PROVINSI	Jumlah Penyelenggara
(1)	(2)
ACEH	238
SUMATERA UTARA	131
SUMATERA BARAT	142
RIAU	101
JAMBI	119
SUMATERA SELATAN	101

PROVINSI	Jumlah Penyelenggara
(1)	(2)
BENGKULU	132
LAMPUNG	124
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	96
KEPULAUAN RIAU	14
DKI JAKARTA	117
JAWA BARAT	250
JAWA TENGAH	93
D.I.YOGYAKARTA	154
JAWA TIMUR	102
BANTEN	57
BALI	289
NUSA TENGGARA BARAT	188
NUSA TENGGARA TIMUR	126
KALIMANTAN BARAT	134
KALIMANTAN TENGAH	195
KALIMANTAN SELATAN	107
KALIMANTAN TIMUR	314
KALIMANTAN UTARA	58
SULAWESI UTARA	50
SULAWESI TENGAH	174
SULAWESI SELATAN	123
SULAWESI TENGGARA	80
GORONTALO	56
SULAWESI BARAT	69
MALUKU	90
MALUKU UTARA	32
PAPUA BARAT	68
PAPUA	83
Total	4,119

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan III Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

7. Data Peserta Pemagangan Luar Negeri

Tabel 2.9
Jumlah Peserta Pemagangan Luar Negeri Menurut Tipe Penyelenggara
Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024*

BULAN	TIPE PENYELENGGARA		JUMLAH
	IM	SO	
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	156	1,394	1,550
Februari	147	1,287	1,434
Maret	192	1,510	1,702
April	190	1,527	1,717

BULAN	TIPE PENYELENGGARA		JUMLAH
	IM	SO	
(1)	(2)	(3)	(4)
Mei	137	1,594	1,731
Juni	153	1,304	1,457
Juli	243	1,224	1,467
Agustus	2	1,321	1,323
September	163	1,353	1,516
Oktober			-
November			-
Desember			-
Total	1,383	12,514	13,897

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan III Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

IM adalah singkatan dari International Manpower

SO adalah singkatan dari Sending Organization

* Angka bersifat sementara

Tabel 2.10
Jumlah Peserta Pemagangan Luar Negeri Menurut Tipe Penyelenggara dan Jenis Kelamin
Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024*

TIPE PENYELENGGARA	JENIS KELAMIN		Tidak Teridentifikasi	JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
INSTANSI PEMERINTAH	1,306	76		1,382
LPK/SO	9,417	3,050	48	12,515
Total	10,723	3,126	48	13,897

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan III Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

8. Data Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri

Tabel 2.11
Jumlah Sending Organization Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri Menurut Provinsi
s.d. Triwulan III Tahun 2024*

PROVINSI	Jumlah Penyelenggara
(1)	(2)
SUMATERA UTARA	11
SUMATERA BARAT	12
RIAU	1
BENGKULU	1
LAMPUNG	8
KEPULAUAN RIAU	2

PROVINSI	Jumlah Penyelenggara
(1)	(2)
DKI JAKARTA	23
JAWA BARAT	185
JAWA TENGAH	71
DI YOGYAKARTA	19
JAWA TIMUR	34
BANTEN	24
BALI	47
NUSA TENGGARA BARAT	11
KALIMANTAN BARAT	1
GORONTALO	1
SULAWESI UTARA	8
SULAWESI TENGGARA	2
SULAWESI SELATAN	6
Total	467

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan III Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

9. Data Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

Tabel 2.12

Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) menurut Provinsi dan Tipe Lembaga
Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024*

PROVINSI	TIPE LEMBAGA							JUMLAH
	BLK KOMUNITAS	BLK UPTD	UPT BPVP	BLKLN	LEMBAGA PELATIHAN K/L	LPK SWASTA	SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ACEH	320	1,312	1,216			64		2,912
SUMATERA UTARA	208	1,086	1,760			112		3,166
SUMATERA BARAT	400	2,176	928			272		3,776
RIAU	64	400	96			32		592
JAMBI	592	672	64			16		1,344
SUMATERA SELATAN	977	1,952	320			192		3,441
BENGKULU	80	992	288			141		1,501
LAMPUNG	862	624	320			112		1,918
KEP. BANGKA BELITUNG	16	96	681					793
KEPULAUAN RIAU		397				15		412
DKI JAKARTA	95					80		175
JAWA BARAT	2,430	5,298	4,301	16		481		12,526
JAWA TENGAH	4,365	7,154	4,181	176		400		16,276
DI YOGYAKARTA	96	515	176			112		899
JAWA TIMUR	4,030	4,901	1,439	64	64	304	128	10,930
BANTEN	1,311	336	1,511			112		3,270

PROVINSI	TIPE LEMBAGA							JUMLAH
	BLK KOMUNITAS	BLK UPTD	UPT BPVP	BLKLN	LEMBAGA PELATIHAN K/L	LPK SWASTA	SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BALI	64	1,360						1,424
NUSA TENGGARA BARAT (NTB)	450	1,725	1,407			96		3,678
NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)	320	384	255			32		991
KALIMANTAN BARAT	352	896				31		1,279
KALIMANTAN TENGAH		1,265				48		1,313
KALIMANTAN SELATAN		640						640
KALIMANTAN TIMUR		279	936					1,215
KALIMANTAN UTARA		288						288
SULAWESI UTARA	94	222						316
SULAWESI TENGAH		677	128					805
SULAWESI SELATAN	320	1,536	3,680			16		5,552
SULAWESI TENGGARA	96	672	1,008					1,776
GORONTALO		553						553
SULAWESI BARAT			112					112
MALUKU	32	128	1,038			32		1,230
MALUKU UTARA	16		1,279					1,295
PAPUA BARAT		240	5					245
PAPUA BARAT DAYA	61		998					1,059
PAPUA	48	45	112					205
PAPUA SELATAN	16	112	96					224
PAPUA TENGAH	16							16
Grand Total	17,731	38,933	28,335	256	64	2,700	128	88,147

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan III Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

Tabel 2.13
Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024*

PROVINSI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	1,508	1,404	2,912
SUMATERA UTARA	1,363	1,803	3,166
SUMATERA BARAT	1,943	1,833	3,776
RIAU	247	345	592
JAMBI	546	798	1,344
SUMATERA SELATAN	1,771	1,670	3,441
BENGKULU	738	763	1,501

PROVINSI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)
LAMPUNG	835	1,083	1,918
KEP. BANGKA BELITUNG	496	297	793
KEPULAUAN RIAU	287	125	412
DKI JAKARTA	77	98	175
JAWA BARAT	7,287	5,239	12,526
JAWA TENGAH	7,522	8,754	16,276
DI YOGYAKARTA	498	401	899
JAWA TIMUR	5,574	5,356	10,930
BANTEN	2,147	1,123	3,270
BALI	628	796	1,424
NUSA TENGGARA BARAT (NTB)	1,887	1,791	3,678
NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)	380	611	991
KALIMANTAN BARAT	670	609	1,279
KALIMANTAN TENGAH	562	751	1,313
KALIMANTAN SELATAN	214	426	640
KALIMANTAN TIMUR	728	487	1,215
KALIMANTAN UTARA	170	118	288
SULAWESI UTARA	150	166	316
SULAWESI TENGAH	391	414	805
SULAWESI SELATAN	2,426	3,126	5,552
SULAWESI TENGGARA	795	981	1,776
GORONTALO	251	302	553
SULAWESI BARAT	68	44	112
MALUKU	681	549	1,230
MALUKU UTARA	671	624	1,295
PAPUA BARAT	102	143	245
PAPUA BARAT DAYA	568	491	1,059
PAPUA	112	93	205
PAPUA SELATAN	139	85	224
PAPUA TENGAH	4	12	16
Total	44,436	43,711	88,147

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan III Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

10. Data Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas

Tabel 2.14
Jumlah Peserta Peningkatan Produktivitas (P3) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024*

Provinsi	Jenis Kelamin		Tidak Teridentifikasi	Total
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	70	155	0	225
SUMATERA UTARA	70	205	0	275
SUMATERA BARAT	22	128	0	150
JAMBI	0	0	25	25
SUMATERA SELATAN	7	18	0	25
BENGKULU	27	23	0	50
LAMPUNG	13	37	0	50
KEP. BANGKA BELITUNG	39	211	0	250
DKI JAKARTA	419	404	33	856
JAWA BARAT	234	459	0	693
JAWA TENGAH	244	306	0	550
DI YOGYAKARTA	20	30	0	50
JAWA TIMUR	141	333	1	475
BANTEN	50	223	27	300
BALI	15	10	0	25
NUSA TENGGARA BARAT	62	138	0	200
KALIMANTAN BARAT	16	34	0	50
KALIMANTAN TENGAH	1	24	0	25
KALIMANTAN SELATAN	28	47	0	75
KALIMANTAN TIMUR	72	153	0	225
SULAWESI UTARA	12	13	0	25
SULAWESI TENGAH	14	36	0	50
SULAWESI SELATAN	205	467	3	675
SULAWESI TENGGARA	49	151	0	200
GORONTALO	20	30	0	50
MALUKU	22	178	0	200
PAPUA BARAT DAYA	6	94	0	100
PAPUA	10	40	0	50
Tidak Teridentifikasi	106	323	21	450
Grand Total	1,994	4,270	110	6,374

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan III Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

11. Data Tenaga Kerja Yang Meningkatkan Produktivitasnya

Tabel 2.15
Jumlah Tenaga Kerja Yang Meningkatkan Produktivitasnya
Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024*

No.	Kegiatan	Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)
1	Workshop Pengukuran Peningkatan Produktivitas	80,301
2	Sosialisasi Peningkatan Produktivitas	2,000
3	Sektor publik	845,743
4	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	6,374
5	Pengukuran Produktivitas oleh UPTP	21,429
6	Pengukuran Produktivitas Botabek dan karawang	9,002
7	BPJS	457,028
8	Pengukuran produktivitas lainnya	91,695
Jumlah		1,513,572

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan III Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

12. Data Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tabel 2.16
Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019 s.d. 2023

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Produktivitas (Juta Rp/Tk)				
	2019	2020	2021*	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38.21	36.06	37.82	37.10	36.87
B. Pertambangan dan Penggalan	564.35	584.57	569.55	560.82	547.78
C. Industri Pengolahan	118.59	126.41	122.22	125.00	129.65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	306.45	358.51	403.70	393.58	398.17
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.93	19.25	17.63	20.03	21.78
F. Konstruksi	127.77	132.94	132.93	132.61	127.54
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	59.60	56.09	56.33	58.41	60.41
H. Transportasi dan Pergudangan	81.88	70.35	74.61	83.87	90.26
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38.93	35.01	33.85	36.22	35.48
J. Informasi dan Komunikasi	639.97	698.68	697.76	743.63	815.56

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Produktivitas (Juta Rp/Tk)				
	2019	2020	2021*	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	249.59	293.65	290.80	291.19	303.11
L. Real Estate	784.59	823.69	936.31	753.35	713.78
M,N. Jasa Perusahaan	106.50	108.90	97.72	95.81	99.54
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	73.88	79.97	75.12	76.59	77.66
P. Jasa Pendidikan	53.20	58.10	54.02	54.16	51.86
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64.30	70.92	71.49	72.24	76.41
R,S,T,U. Jasa lainnya	32.21	30.67	34.77	36.42	38.01
PRODUK DOMESTIK BRUTO	85.04	83.48	84.85	86.55	87.96

Sumber: BPS. Sakernas Agustus 2015 - 2023, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: Publikasi PDB 6 Maret 2024 (bps.go.id)

*Angka Sementara

**Angka sangat sementara

***Data Sakernas 2018 & 2019 merupakan hasil backcasting SUPAS 2015

Tabel 2.17
Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Provinsi Tahun 2019 s.d. Tahun 2023

Provinsi	Produktivitas (Juta Rp/Tk)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ACEH	58.52	55.76	57.28	58.85	60.04
SUMATERA UTARA	76.94	78.01	77.84	79.69	79.77
SUMATERA BARAT	67.80	65.63	67.79	67.94	67.16
RIAU	167.82	162.09	160.84	167.10	183.80
JAMBI	88.57	85.31	88.06	89.95	93.92
SUMATERA SELATAN	78.62	77.02	78.09	80.07	82.03
BENGKULU	46.25	44.91	46.83	48.11	48.65
LAMPUNG	58.38	56.15	57.64	58.69	57.31
KEP. BANGKA BELITUNG	76.84	75.31	78.94	79.08	80.47
KEP. RIAU	183.93	172.10	166.41	164.50	196.25
DKI JAKARTA	378.38	384.67	391.79	400.70	404.21
JAWA BARAT	67.57	67.05	67.57	67.80	71.03
JAWA TENGAH	56.33	55.04	55.92	57.11	55.16
DI YOGYAKARTA	48.05	47.83	48.18	50.38	55.44
JAWA TIMUR	78.44	76.87	79.32	81.33	81.26
BANTEN	82.24	79.46	80.89	81.50	91.98
BALI	65.89	60.86	58.92	57.85	60.91
NUSA TENGGARA BARAT	37.22	36.22	35.91	37.55	35.92
NUSA TENGGARA TIMUR	26.53	25.24	25.12	24.94	25.98

Provinsi	Produktivitas (Juta Rp/Tk)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN BARAT	56.13	54.81	56.88	58.01	55.84
KALIMANTAN TENGAH	76.08	75.06	76.11	81.14	84.16
KALIMANTAN SELATAN	65.15	62.82	64.20	68.03	71.76
KALIMANTAN TIMUR	287.29	279.06	281.59	289.74	291.04
KALIMANTAN UTARA	191.90	183.83	186.79	187.96	187.54
SULAWESI UTARA	77.47	77.66	81.46	83.42	81.59
SULAWESI TENGAH	87.27	88.47	98.28	108.79	124.86
SULAWESI SELATAN	81.43	81.90	82.54	82.89	83.98
SULAWESI TENGGARA	74.49	72.48	73.30	76.84	80.02
GORONTALO	49.63	50.00	50.28	49.31	50.11
SULAWESI BARAT	49.73	47.66	47.92	45.98	47.68
MALUKU	40.95	39.66	39.59	41.20	41.40
MALUKU UTARA	48.20	50.74	57.57	68.80	76.41
PAPUA BARAT	142.14	134.11	126.71	128.19	144.63
PAPUA BARAT DAYA					86.45
PAPUA	75.09	81.45	84.05	89.37	114.64
PAPUA SELATAN					89.83
PAPUA TENGAH					123.68
PAPUA PEGUNUNGAN					13.20
INDONESIA	85.04	83.48	84.85	86.55	87.96

Sumber: BPS. Sakernas Agustus 2011 - 2023, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: Publikasi PDRB 23 Februari 2024 (bps.go.id)

Perbedaan antara jumlah PDRB 34 Provinsi dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik

*Angka Sementara

**Angka sangat sementara

***Sakernas 2018 & 2019 merupakan hasil backcasting

13. Data Instruktur

Tabel 2.18
Jumlah Instruktur menurut Provinsi dan Kategori Instruktur
s.d. Semester I Tahun 2024*

Provinsi	Kategori Instruktur		Jumlah
	Instruktur Pemerintah	Instruktur Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	102	298	400
Sumatera Utara	134	899	1,033

Provinsi	Kategori Instruktur		Jumlah
	Instruktur Pemerintah	Instruktur Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera Barat	164	326	490
Riau	36	378	414
Jambi	44	245	289
Sumatera Selatan	101	357	458
Bengkulu	65	160	225
Lampung	61	414	475
Kepulauan Bangka Belitung	42	87	129
Kepulauan Riau	13	130	143
D.K.I. Jakarta	616	1,540	2,156
Jawa Barat	492	2,910	3,402
Jawa Tengah	704	1,532	2,236
D.I. Yogyakarta	141	270	411
Jawa Timur	417	2,444	2,861
Banten	127	765	892
Bali	64	524	588
Nusa Tenggara Barat	101	774	875
Nusa Tenggara Timur	37	179	216
Kalimantan Barat	48	174	222
Kalimantan Tengah	41	247	288
Kalimantan Selatan	111	520	631
Kalimantan Timur	74	431	505
Kalimantan Utara	19	34	53
Sulawesi Utara	17	154	171
Sulawesi Tengah	38	235	273
Sulawesi Selatan	264	876	1,140
Sulawesi Tenggara	79	243	322
Gorontalo	38	107	145
Sulawesi Barat	11	84	95
Maluku	58	67	125
Maluku Utara	48	41	89
Papua Barat	39	41	80
Papua	46	98	144
Tidak Teridentifikasi	38	139	177
Total	4,430	17,723	22,153

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester I Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

*angka bersifat sementara

14. Data Tenaga Pelatihan

Tabel 2.19
Jumlah Tenaga Pelatihan menurut Kategori Tenaga Pelatihan
s.d Semester I Tahun 2024

Tenaga Pelatihan Pemerintah	Tenaga Pelatihan Swasta	Jumlah
-1	-2	-3
2,658	8,868	11,526
2,658	8,868	11,526

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data hingga Semester I Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

15. Data Tenaga Kerja Tersertifikasi

Tabel 2.20
Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024*

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,641	2,875	6,515
Sumatera Utara	13,217	10,042	23,252
Sumatera Barat	7,665	7,862	15,521
Riau	13,082	7,814	20,892
Jambi	3,613	2,346	5,954
Sumatera Selatan	11,745	6,750	18,492
Bengkulu	2,208	2,376	4,583
Lampung	7,156	12,025	19,177
Kepulauan Bangka Belitung	1,565	911	2,475
Kepulauan Riau	6,716	4,429	11,143
DKI Jakarta	47,879	39,560	87,415
Jawa Barat	85,276	87,508	172,714
Jawa Tengah	68,082	73,747	141,806
Daerah Istimewa Yogyakarta	9,343	8,609	17,948
Jawa Timur	61,715	68,779	130,453
Banten	20,094	15,585	35,667
Bali	25,313	17,758	43,059
Nusa Tenggara Barat	7,342	9,291	16,628
Nusa Tenggara Timur	3,019	4,437	7,455

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalimantan Barat	4,288	3,006	7,293
Kalimantan Tengah	3,116	2,447	5,562
Kalimantan Selatan	9,774	6,080	15,842
Kalimantan Timur	27,460	11,159	38,610
Kalimantan Utara	1,366	688	2,054
Sulawesi Utara	2,341	1,697	4,036
Sulawesi Tengah	2,496	989	3,484
Sulawesi Selatan	12,876	8,655	21,523
Sulawesi Tenggara	2,343	1,516	3,858
Gorontalo	720	851	1,571
Sulawesi Barat	947	776	1,723
Maluku	1,234	1,016	2,246
Maluku Utara	1,028	618	1,645
Papua	758	504	1,262
Papua Barat	613	273	886
Papua Selatan	263	197	459
Papua Tengah	586	150	736
Papua Pegunungan	99	36	135
Papua Barat Daya	1,026	765	1,791
Grand Total	472,005	424,127	895,865

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan III Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

* Angka bersifat sementara

16. Data LSP Terlisensi

Tabel 2.21
Jumlah LSP Terlisensi menurut Provinsi dan Jenis LSP
s.d. Semester I Tahun 2024

Provinsi	Jenis LSP			Total
	LSP P1	LSP P2	LSP P3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	37	1		38
Sumatera Utara	36	1	4	41
Sumatera Barat	67	2	1	70
Riau	34		2	36
Jambi	9			9
Sumatera Selatan	52	1	2	55
Bengkulu	4			4

Provinsi	Jenis LSP			Total
	LSP P1	LSP P2	LSP P3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung	37		3	40
Kepulauan Bangka Belitung	7	1		8
Kepulauan Riau	19		4	23
DKI Jakarta	162	49	224	435
Jawa Barat	271	25	104	400
Jawa Tengah	313	8	19	340
Daerah Istimewa Yogyakarta	64	4	15	83
Jawa Timur	313	14	57	384
Banten	42	4	25	71
Bali	46		17	63
Nusa Tenggara Barat	16	2	3	21
Nusa Tenggara Timur	13		1	14
Kalimantan Barat	11		1	12
Kalimantan Tengah	9		2	11
Kalimantan Selatan	25			25
Kalimantan Timur	39	4	2	45
Kalimantan Utara	3			3
Sulawesi Utara	9		1	10
Sulawesi Tengah	6			6
Sulawesi Selatan	33	4	7	44
Sulawesi Tenggara		1		1
Gorontalo	4			4
Sulawesi Barat	13		1	14
Maluku	5	1		6
Maluku Utara	2	1		3
Papua Barat	5	1		6
Papua	8			8
Total	1,714	124	495	2,333

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester I Tahun 2024) – diolah Pusdatik Kemnaker

BAB III

DATA BIDANG PENEMPATAN

DAN PERLUASAN KESEMPATAN

KERJA

3.1 Data PMI yang Ditempatkan

3. 1. 1. Jumlah Penempatan PMI Berdasarkan Skema Penempatan, Sektor dan Jenis Kelamin Periode Januari – September Tahun 2024

No	Skema Penempatan	FORMAL		Total	INFORMAL		Total	Grand Total
		L	P		L	P		
1	G TO G	7.161	551	7.712				7.712
2	P TO P	46.458	14.464	60.922	336	120.012	120.348	181.270
3	PERPANJANGAN PK DALAM NEGERI	535	336	871	31	301	332	1.203
4	PERPANJANGAN PK LUAR NEGERI	5.299	15.075	20.374				20.374
5	PERSEORANGAN (MANDIRI)	10.638	5.675	16.313				16.313
6	UKPS	649	5	654				654
Grand Total		70.740	36.106	106.846	367	120.313	120.680	227.526

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Oktober 2024

3. 1. 2. Jumlah Penempatan PMI Berdasarkan Negara Penempatan, Sektor dan Jenis Kelamin Periode Januari – September Tahun 2024

Negara Penempatan	FORMAL		Total	INFORMAL		Total	Grand Total
	L	P		L	P		
ALBANIA	14	17	31				31
AMERIKA SERIKAT	4		4				4
ANGUILLA		2	2				2
ARAB SAUDI	3.616	2.074	5.690	10	137	147	5.837
ARMENIA		3	3				3
AUSTRALIA	2		2				2
AUSTRIA	11	2	13				13
AZERBAIJAN		7	7				7
BAHAMA	32		32				32
BAHRAIN	27	29	56		1	1	57
BELANDA	1		1				1
BOSNIA DAN HERZEGOVINA	34	12	46				46
BRUNEI DARUSSALAM	1.668	397	2.065	14	71	85	2.150
BULGARIA	91	57	148	1		1	149
BURKINA FASO		1	1				1
CINA	3	16	19				19
ERITREA	1		1				1
GABON	21	1	22				22
GUINEA		3	3				3
HONG KONG	7	245	252	206	77.341	77.547	77.799
HUNGARIA	253	55	308				308
INDIA	1		1				1
ITALIA	2.276	252	2.528				2.528
JEPANG	5.919	3.653	9.572	4		4	9.576
JERMAN	39	76	115				115
KAMBOJA	7	1	8				8

Negara Penempatan	FORMAL		Total	INFORMAL		Total	Grand Total
	L	P		L	P		
KANADA	1		1				1
KAZAKHSTAN		19	19				19
KEPULAUAN COOK	29	9	38				38
KEPULAUAN TURKS DAN CAICOS	1		1				1
KEPULAUAN VIRGIN INGGRIS	3	1	4				4
KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA	92	58	150				150
KIRGISTAN		3	3				3
KOMORO	2		2				2
KONGO	1		1				1
KOREA SELATAN	7.534	255	7.789	18		18	7.807
KROASIA	262	55	317	1		1	318
KUWAIT	229	162	391				391
LATVIA		2	2				2
LIBANON		2	2				2
LIBERIA	11		11				11
LIBYA	2		2				2
MAKAO	14	15	29				29
MALADEWA	150	262	412		2	2	414
MALAYSIA	22.032	7.768	29.800	17	8.358	8.375	38.175
MAROKO		1	1				1
MAURITIUS	4	2	6				6
MEKSIKO	56	12	68				68
MESIR	6	8	14		1	1	15
MONTENEGRO	4		4				4
MOZAMBIK	37		37				37
NIGERIA		4	4				4
OMAN	74	37	111		22	22	133
PALAU		1	1				1
PAPUA NUGINI	368	23	391	2		2	393
PERANCIS	51	19	70				70
PERSEMAKMURAN DOMINIKA	180		180				180
POLANDIA	786	299	1.085		1	1	1.086
PORTUGAL	8	3	11				11
PULAU SOLOMON	177	2	179				179
QATAR	305	81	386	1	4	5	391
REPUBLIK MOLDOVA		1	1				1
RUMANIA	148	105	253		2	2	255
SELANDIA BARU	78	20	98				98
SERBIA	2	4	6				6
SEYCHELLES	4	4	8				8
SINGAPURA	7	38	45	2	7.627	7.629	7.674
SIPRUS		62	62		1	1	63
SLOVAKIA	324	30	354				354
SPANYOL	3		3				3

Negara Penempatan	FORMAL		Total	INFORMAL		Total	Grand Total
	L	P		L	P		
SRILANKA	18	44	62				62
TAIWAN	22.075	17.486	39.561	91	26.721	26.812	66.373
THAILAND	1		1				1
TONGA	5	1	6				6
TURKI	805	1.532	2.337		4	4	2.341
UKRAINA		7	7				7
UNI EMIRAT ARAB	211	719	930		19	19	949
UZBEKISTAN		24	24				24
VIETNAM	4		4				4
YORDANIA	16	23	39		1	1	40
YUNANI	1		1				1
ZAMBIA	592		592				592
Grand Total	70.740	36.106	106.846	367	120.313	120.680	227.526

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Oktober 2024

3. 1. 3. Jumlah Penempatan PMI Berdasarkan Provinsi Asal, Sektor dan Jenis Kelamin Periode Januari – September Tahun 2024

Provinsi Asal	FORMAL		Total	INFORMAL		Total	Grand Total
	L	P		L	P		
ACEH	211	141	352	1	12	13	365
BALI	3.524	2.623	6.147	3	33	36	6.183
BANGKA BELITUNG	27	7	34		6	6	40
BANTEN	938	445	1.383	4	1.350	1.354	2.737
BENGKULU	242	102	344		208	208	552
DI YOGYAKARTA	444	314	758	7	317	324	1.082
DKI JAKARTA	453	305	758	7	500	507	1.265
GORONTALO	5	5	10		6	6	16
JAMBI	110	75	185		55	55	240
JAWA BARAT	9.889	7.676	17.565	48	29.849	29.897	47.462
JAWA TENGAH	15.650	7.655	23.305	79	28.131	28.210	51.515
JAWA TIMUR	14.209	7.424	21.633	160	40.465	40.625	62.258
KALIMANTAN BARAT	380	179	559	1	52	53	612
KALIMANTAN SELATAN	27	38	65		76	76	141
KALIMANTAN TENGAH	9	11	20		20	20	40
KALIMANTAN TIMUR	85	26	111	2	31	33	144
KALIMANTAN UTARA	222	22	244		1	1	245
KEPULAUAN RIAU	402	88	490		34	34	524
LAMPUNG	5.216	2.595	7.811	23	11.613	11.636	19.447
MALUKU	25	4	29		15	15	44
MALUKU UTARA	2	4	6				6
NUSA TENGGARA BARAT	14.945	1.246	16.191	20	4.542	4.562	20.753
NUSA TENGGARA TIMUR	61	49	110	5	1.300	1.305	1.415
PAPUA	14	15	29		1	1	30

Provinsi Asal	FORMAL		Total	INFORMAL		Total	Grand Total
	L	P		L	P		
PAPUA BARAT	4	4	8				8
RIAU	114	118	232	1	24	25	257
SULAWESI BARAT	85	24	109		13	13	122
SULAWESI SELATAN	389	227	616	2	57	59	675
SULAWESI TENGAH	31	78	109		157	157	266
SULAWESI TENGGARA	63	37	100		71	71	171
SULAWESI UTARA	83	54	137		387	387	524
SUMATERA BARAT	287	163	450		10	10	460
SUMATERA SELATAN	479	310	789	1	740	741	1.530
SUMATERA UTARA	2.115	4.042	6.157	3	237	240	6.397
Grand Total	70.740	36.106	106.846	367	120.313	120.680	227.526

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Oktober 2024

3.2 Data Perusahaan Penempatan PMI

3.2.1. Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Berdasarkan Provinsi di Indonesia Periode Januari – Agustus Tahun 2024

No	Provinsi	Grand Total
1	Bali	15
2	Banten	18
3	DI Yogyakarta	3
4	DKI Jakarta	140
5	Jawa Barat	118
6	Jawa Tengah	42
7	Jawa Timur	78
8	Kalimantan Barat	2
9	Kalimantan Utara	1
10	Kepulauan Riau	5
11	Lampung	7
12	Nusa Tenggara Barat	14
13	Nusa Tenggara Timur	1
14	Sumatera Barat	2
15	Sumatera Selatan	1
16	Sumatera Utara	8
Grand Total		455

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.3 Data Lowongan Kerja di Luar Negeri

3.3.1. Jumlah Job Order Berdasarkan Negara dan Jenis Kelamin Periode Januari – September Tahun 2024

No	Negara	Jenis Kelamin			Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki/Perempuan	
1	Arab Saudi	2.103	5.792	100	7.995
2	Bahrain	-	30	-	30
3	Bosnia dan Herzegovina	-	-	44	44
4	Brunei Darussalam	1.047	215	4.567	5.829
5	Bulgaria	25	15	735	775
6	Czechia	500	-	-	500
7	Denmark	-	-	2.500	2.500
8	Estonia	150	-	-	150
9	Federasi Rusia	-	40	-	40
10	Hong Kong	1.954	53.566	100	55.620
11	Hungaria	110	40	998	1.148
12	Jepang	539	241	249	1.029
13	Jerman	123	87	-	210
14	Korea Selatan	795	-	-	795
15	Kroasia	2.740	1.396	-	4.136
16	Kuwait	1.073	920	1.631	3.624

No	Negara	Jenis Kelamin			Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki/Perempuan	
17	Makao	-	-	600	600
18	Maladewa	-	25	-	25
19	Malaysia	31.922	73.902	-	105.824
20	Mauritius	20	-	-	20
21	Nigeria	-	20	-	20
22	Papua Nugini	27	-	-	27
23	Perancis	-	-	90	90
24	Polandia	1.530	390	1.925	3.845
25	Qatar	1.716	486	2.901	5.103
26	Rumania	310	305	1.080	1.695
27	Selandia Baru	180	30	48	258
28	Singapura	-	33.672	1.380	35.052
29	Slovakia	2.585	106	768	3.459
30	Srilanka	20	-	-	20
31	Taiwan	259.205	573.364	-	832.569
32	Turki	549	1.110	3.815	5.474
33	Uni Emirat Arab	349	3.160	1.801	5.310
34	Yordania	52	56	55	163
Grand Total		309.624	748.968	25.387	1.083.979

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Oktober 2024

3.4 Data PMI yang Mendapat Layanan Perlindungan di Negara Penempatan

3.4.1. Jumlah PMI yang Mendapat Layanan Perlindungan di Negara Penempatan Periode Januari – Agustus Tahun 2024

No	Kota	Negara	Jumlah
1	Riyadh*	Arab Saudi*	-
2	Singapura	Singapura	2.249
3	Jeddah	Arab Saudi	1.637
4	Amman	Yordania	32
5	Abu Dhabi	Uni Emirat Arab	1.389
6	Bandar Seri Begawan*	Brunei Darussalam*	-
7	Kuwait City	Kuwait	102
8	Hongkong	Hongkong	268
9	Seoul	Korea Selatan	120
10	Doha	Qatar	355
11	Taipei	Taiwan	54
12	Kuala Lumpur	Malaysia	47
Jumlah			6.253

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: angka sementara per 6 September 2024

3.5 Data Permasalahan PMI di Luar Negeri

3.5.1. Jumlah Pengaduan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Penempatan dan Media Pelaporan Periode Januari – September Tahun 2024

Negara Penempatan	Media Pelaporan								Grand Total
	Email	e-Pengaduan/ e-Crisis Center	Lain-Lain	Langsung	Media Sosial	SMS	Surat	Telepon	
ALJAZAIR							1	1	2
ARGENTINA							2	1	3
AUSTRALIA				5	1		1	2	9
BAHAMAS				3					3
BAHRAIN				3					3
BARBADOS							1		1
BRUNEI DARUSSALAM				1	2		3	3	9
CAMBODIA			2	19	23		2	2	48
CANADA								1	1
CHINA				3	11			2	16
CONGO								1	1
CROATIA (HRVATSKA)				1					1
CZECH REPUBLIC					1				1
FAROE ISLANDS								1	1
FIJI ISLANDS			1	1					2
GERMANY				4					4
HONG KONG			2	18	14		12	10	56
HUNGARY				1			1		2
IRAQ				7	2		5	5	19
JAPAN				5	2		3	3	13
KOREA SELATAN	1		1	21	5		6	16	50
KUWAIT			1						1
LAINNYA			2					1	3
LAOS	1			9					10
LIBYA				1	1			1	3
MACAO SAR								1	1
MALAYSIA	2	5	6	87	58	1	171	33	363
MALDIVES				1					1
MAURITIUS				1				1	2
MESIR		1						1	2
MYANMAR				6			5	1	12
OMAN								1	1
PERU								1	1
PHILIPPINES			1	1			1		3
POLAND	1			11			1	4	17
PORTUGAL				3				4	7
QATAR				3				5	8
SAMOA					13				13
SAUDI ARABIA	3		5	61	11		27	36	143

Negara Penempatan	Media Pelaporan								Grand Total
	Email	e-Pengaduan/ e-Crisis Center	Lain-Lain	Langsung	Media Sosial	SMS	Surat	Telepon	
SENEGAL								2	2
SINGAPORE	1		1	11	1		7	12	33
SLOVAKIA				2			1	2	5
SOLOMON ISLANDS						3		2	5
SRI LANKA								1	1
SURINAME					1				1
SYRIA				1			1	2	4
TAIWAN	6	1	3	70	14	1	68	50	213
THAILAND				4					4
TRINIDAD AND TOBAGO							3		3
TURKEY								1	1
UNITED ARAB EMIRATES		1		12	2		4	9	28
UNITED KINGDOM				7	1		1		9
UNITED STATES				4				1	5
URUGUAY								1	1
YORDANIA		1		3	1				5
Grand Total	15	9	25	390	164	5	327	221	1.156

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Oktober 2024

3.6 Data Tenaga Kerja Pendamping TKA

3. 6. 1. Jumlah Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing Periode Januari – September Tahun 2024

Jenis Usaha	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Jumlah
Jasa	4.363	3.884	5.037	4.189	6.777	6.618	7.073	6.390	6.949	51.280
Industri	5.448	5.225	4.841	4.306	5.683	6.178	6.295	6.742	6.751	51.469
Pertanian Maritim	399	356	397	302	402	470	466	442	222	3.456
Total	10.210	9.465	10.275	8.797	12.862	13.266	13.834	13.574	13.922	106.205

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.7 Data Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan

3. 7. 1. Jumlah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Menurut Jenis Usaha Periode Januari – September Tahun 2024

Jenis Usaha	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Jumlah
Industri	6.818	6.358	6.053	5.341	7.047	7.560	7.854	7.818	7.999	62.848
Jasa	6.203	5.414	6.759	5.703	8.732	8.577	9.155	8.260	8.831	67.634
Pertanian dan Maritim	347	439	344	360	385	380	522	335	385	3.497
Total	13.368	12.211	13.156	11.404	16.164	16.517	17.531	16.413	17.215	133.979

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3. 7. 2. Jumlah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Menurut Level Jabatan Periode Januari – September Tahun 2024

Level Jabatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Jumlah
Advisor/Consultant	2.935	2.412	2.850	2.478	3.388	3.373	3.820	3.243	3.643	28.142
Direksi	1.053	966	942	842	1.096	1.092	1.279	934	1.110	9.314
Komisaris	128	88	85	80	115	113	158	170	195	1.132
Manager	2.721	2.456	2.732	2.075	2.817	3.005	3.216	3.239	3.340	25.601
Profesional	6.531	6.289	6.547	5.929	8.748	8.934	9.058	8.827	8.927	69.790
Total	13.368	12.211	13.156	11.404	16.164	16.517	17.531	16.413	17.215	133.979

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3. 7. 3. Jumlah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Menurut Negara Periode Januari – September Tahun 2024

Negara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Jumlah
Amerika Serikat	232	166	159	251	352	275	324	255	255	2.269
Australia	254	259	260	222	261	315	270	248	234	2.323
India	761	639	652	555	854	914	981	778	845	6.979
Inggris	182	168	180	196	296	229	280	215	172	1.918
Jepang	1.302	1.150	1.382	1.231	1.428	1.254	1.279	1.159	1.196	11.381
Korea Selatan	1.145	1.008	1.074	845	1.150	1.167	1.195	966	1.000	9.550
Malaysia	519	446	439	374	607	516	613	501	576	4.591
Philippina	261	234	279	376	670	589	575	374	373	3.731
Republik Rakyat China	6.675	6.493	6.870	5.697	8.336	9.121	9.391	9.777	10.307	72.667

Negara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Jumlah
Singapura	183	140	159	123	170	192	204	175	169	1.515
Lain lain	1.854	1.508	1.702	1.534	2.040	1.945	2.419	1.965	2.088	17.055
Total	13.368	12.211	13.156	11.404	16.164	16.517	17.531	16.413	17.215	133.979

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3. 7. 4. Jumlah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Menurut Provinsi Periode Januari – September Tahun 2024

Provinsi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Jumlah
Aceh	3	14	10	4	3	1	8	3	9	55
Bali	437	389	407	432	521	658	673	554	604	4.675
Bangka Belitung	60	40	85	64	61	66	89	58	61	584
Banten	549	486	560	472	869	791	814	650	684	5.875
Bengkulu	2	-	1	-	1	1	8	2	5	20
D.I.Yogyakarta	25	8	7	11	21	22	24	30	30	178
DKI Jakarta	1.007	1.058	995	967	1.632	1.375	1.617	1.278	1.294	11.223
Gorontalo	5	2	1	2	-	-	3	4	6	23
Jambi	14	6	8	14	6	8	20	12	16	104
Jawa Barat	889	785	863	733	1.018	953	1.112	1.033	977	8.363
Jawa Tengah	336	253	277	266	275	458	580	428	495	3.368
Jawa Timur	389	351	348	247	496	490	542	360	435	3.658
Kalimantan Barat	15	13	60	47	22	53	47	49	27	333
Kalimantan Selatan	21	55	24	4	37	18	15	15	26	215
Kalimantan Tengah	13	9	11	11	7	12	19	5	12	99
Kalimantan Timur	16	10	13	5	21	19	49	23	52	208
Kalimantan Utara	15	7	10	22	7	18	27	53	16	175
Kepulauan Riau	494	367	553	511	536	596	657	518	794	5.026
Lampung	14	5	6	6	18	1	23	22	29	124
Maluku	567	625	1.102	810	803	1.128	1.245	984	829	8.093
Maluku Utara	565	626	1.102	810	799	1.120	1.237	979	828	8.066
Nusa Tenggara Barat	89	76	63	122	41	69	117	286	357	1.220
Nusa Tenggara Timur	20	19	20	17	14	16	76	25	48	255
Papua	39	42	42	36	63	44	38	51	43	398
Papua Barat	6	2	5	1	9	11	6	5	5	50
Papua Barat Daya	1	1	4	1	4	8	4	3	4	30
Papua Pegunungan	1	-	-	-	-	1	1	3	1	7
Papua Selatan	1	3	-	-	3	1	3	3	5	19
Papua Tengah	28	33	37	32	45	25	15	21	22	258
Riau	514	392	570	528	557	620	687	548	815	5.231
Sulawesi Barat	1	-	2	-	-	1	1	3	2	10
Sulawesi Selatan	71	20	44	40	32	55	62	64	95	483
Sulawesi Tengah	1.651	1.388	784	648	1.703	1.978	1.740	2.433	2.103	14.428
Sulawesi Tenggara	12	381	33	303	206	297	189	242	164	1.827
Sulawesi Utara	11	13	20	37	28	41	26	18	28	222
Sumatera Barat	6	10	14	7	2	7	6	9	9	70
Sumatera Selatan	59	45	26	34	51	52	63	83	76	489
Sumatera Utara	76	52	63	62	95	132	105	109	88	782

Provinsi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Jumlah
Lintas Provinsi	5.346	4.625	4.986	4.098	6.158	5.371	5.583	5.447	6.121	47.735
Total	13.368	12.211	13.156	11.404	16.164	16.517	17.531	16.413	17.215	133.979

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.8 Data Pengantar Kerja

3. 8. 1. Jumlah Fungsional Pengantar Kerja Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Periode Semester I Tahun 2024

Penempatan	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-laki	Perempuan	
ACEH	6	6	12
BALI	20	15	35
BANTEN	27	12	39
BENGKULU	6	7	13
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	14	21	35
DKI JAKARTA	174	176	350
GORONTALO	4	6	10
HONGKONG		1	1
JAMBI	13	15	28
JAWA BARAT	92	76	168
JAWA TENGAH	63	91	154
JAWA TIMUR	72	60	132
JORDANIA	1		1
KALIMANTAN BARAT	24	13	37
KALIMANTAN SELATAN	10	5	15
KALIMANTAN TENGAH	13	13	26
KALIMANTAN TIMUR	9	18	27
KALIMANTAN UTARA	7	5	12
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	11	9	20
KEPULAUAN RIAU	11	15	26
KEPULUAN RIAU	1	2	3
KOREA		1	1
LAMPUNG	13	16	29
MALAYSIA	1		1
MALUKU	2	3	5
MALUKU UTARA	2	3	5
NUSA TENGGARA BARAT	26	15	41
NUSA TENGGARA TIMUR	22	17	39
PAPUA BARAT		3	3
PAPUA TENGAH	1		1
RIAU	14	11	25
SULAWESI BARAT	2	6	8
SULAWESI SELATAN	36	60	96
SULAWESI TENGAH	6	10	16
SULAWESI TENGGARA	17	13	30

Penempatan	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-laki	Perempuan	
SULAWESI UTARA	8	5	13
SUMATERA BARAT	24	40	64
SUMATERA SELATAN	17	26	43
SUMATERA UTARA	24	20	44
TAIWAN		1	1
Grand Total	793	816	1.609

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3. 8. 2. Jumlah Fungsional Pengantar Kerja Berdasarkan Provinsi dan Instansi Penempatan Periode Semester I Tahun 2024

PENEMPATAN	PUSAT					DAERAH			TOTAL
	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN				BP2MI	PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	
	SEKRETARIAT JENDERAL	DITJEN BINALAVOTAS	DITJEN BINAPENTA DAN PKK	BARENBANG					
ACEH		2			7		2	1	12
BALI					6	5	20	4	35
BANTEN		4			13	3	3	16	39
BENGKULU						3	8	2	13
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA					12	5	13	5	35
DKI JAKARTA	19	4	133	4	152	15		23	350
GORONTALO							8	2	10
HONGKONG			1						1
JAMBI						6	19	3	28
JAWA BARAT		13	21		17	6	74	37	168
JAWA TENGAH		4			27	11	87	25	154
JAWA TIMUR		4			14	15	77	22	132
JORDANIA			1						1
KALIMANTAN BARAT					10	5	19	3	37
KALIMANTAN SELATAN					4	1	6	4	15
KALIMANTAN TENGAH						4	14	8	26
KALIMANTAN TIMUR		3				2	9	13	27
KALIMANTAN UTARA					6		5	1	12
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		3				2	13	2	20
KEPULAUAN RIAU					7	3	7	9	26
KEPULUAN RIAU						1		2	3
KOREA			1						1
LAMPUNG					8	5	14	2	29
MALAYSIA			1						1
MALUKU		1				1		3	5
MALUKU UTARA		3						2	5
NUSA TENGGARA BARAT		3			14	3	19	2	41

PENEMPATAN	PUSAT					DAERAH			TOTAL
	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN				BP2MI	PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	
	SEKRETARIAT JENDERAL	DITJEN BINALAVOTAS	DITJEN BINAPENTA DAN PKK	BARENBANG					
NUSA TENGGARA TIMUR					13	5	21		39
PAPUA BARAT		2				1			3
PAPUA TENGAH							1		1
RIAU					7	2	12	4	25
SULAWESI BARAT						6	2		8
SULAWESI SELATAN		14			9	15	45	13	96
SULAWESI TENGAH					3	1	12		16
SULAWESI TENGGARA		5	4		3		16	2	30
SULAWESI UTARA					9	1	3		13
SUMATERA BARAT		5			7	15	24	13	64
SUMATERA SELATAN					7		25	11	43
SUMATERA UTARA		2			11		18	13	44
TAIWAN			1						1
Grand Total	19	72	163	4	366	142	596	247	1.609

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.9 Data Petugas Antar Kerja

3. 9. 1. Jumlah Petugas Antar Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Periode Semester I Tahun 2024

No	Provinsi	Jenis Kelamin		Grand Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Aceh	41	34	75
2	Bali	12	9	21
3	Bangka Belitung	4	1	5
4	Banten	53	23	76
5	DI Yogyakarta	17	11	28
6	DKI Jakarta	12	14	26
7	Gorontalo	15	9	24
8	Jambi	28	17	45
9	Jawa Barat	46	10	56
10	Jawa Tengah	7	3	10
11	Jawa Timur	21	15	36
12	Kalimantan Barat	2	4	6
13	Kalimantan Selatan	6	3	9
14	Kalimantan Tengah	15	7	22
15	Kalimantan Timur	18	17	35
16	Kepulauan Riau	8	1	9
17	Lampung	18	12	30
18	Nusa Tenggara Barat	22	7	29
19	Nusa Tenggara Timur	2	1	3
20	Papua	1	5	6
21	Riau	25	20	45
22	Sulawesi Barat	1	1	2
23	Sulawesi Selatan	2		2
24	Sulawesi Tenggara	2	8	10
25	Sumatera Barat	6	6	12
26	Sumatera Selatan	2	1	3
27	Sumatera Utara	1	7	8
Grand Total		387	246	633

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: *Data laporan terakhir per Juli 2024

3.10 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

3. 10. 1. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Menurut Provinsi dan Pendidikan Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2024

PROVINSI	KATEGORI PENDIDIKAN				
	DASAR	MENENGAH	TINGGI	TIDAK TERIDENTIFIKASI	GRAND TOTAL
ACEH		6			6

PROVINSI	KATEGORI PENDIDIKAN				
	DASAR	MENENGAH	TINGGI	TIDAK TERIDENTIFIKASI	GRAND TOTAL
BALI	15	204	54	386	659
BANTEN	58	5636	6	16	5716
BENGKULU	2	39	1	1	43
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		1504	117	5397	7018
DKI JAKARTA	7	35	13	31	86
Gorontalo	5	119	34		158
JAMBI	14	57	4	8	83
JAWA BARAT	477	10984	342	2684	14487
JAWA TENGAH	137	1778	125	992	3032
JAWA TIMUR	125	498	8	108	739
KALIMANTAN BARAT	10	541	4	1	556
KALIMANTAN SELATAN	32	172	6	2	212
KALIMANTAN TENGAH	4	9	2	2	17
KALIMANTAN TIMUR	3	13		9	25
KALIMANTAN UTARA	1	3			4
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2	13	8	1	24
KEPULAUAN RIAU	1	288	15	1	305
LAMPUNG	138	1207	5	11	1361
MALUKU		10	1		11
MALUKU UTARA	1	4	2	2	9
NUSA TENGGARA BARAT	89	75	7	122	293
NUSA TENGGARA TIMUR	191	606	12	75	884
PAPUA		6	1	1	8
PAPUA BARAT		2			2
PAPUA PEGUNUNGAN				1	1
PAPUA SELATAN	1				1
PAPUA TENGAH	1	2			3
RIAU	158	63	7	1	229
SULAWESI BARAT	26	52	5	21	104
SULAWESI SELATAN	62	298	22	90	472
SULAWESI TENGAH	5	50	2	7	64
SULAWESI TENGGARA	4	55	10	4	73
SULAWESI UTARA	5	57	2	2	66
SUMATERA BARAT	11	21	10	7	49
SUMATERA SELATAN	69	293	13	9	384
SUMATERA UTARA	26	348	6	4	384
TIDAK TERIDENTIFIKASI		72	1	3	76
GRAND TOTAL	1680	25120	845	9999	37644

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK dan laporan dinas, diolah Pusdatik Kemnaker
Keterangan: Data sangat sementara

**3. 10. 2. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2024**

PROVINSI	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	GRAND TOTAL
ACEH		6	6
BALI	414	245	659
BANTEN	2711	3005	5716
BENGKULU	12	31	43
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5128	1890	7018
DKI JAKARTA	7	79	86
GORONTALO	112	46	158
JAMBI	56	27	83
JAWA BARAT	5285	9202	14487
JAWA TENGAH	896	2136	3032
JAWA TIMUR	109	630	739
KALIMANTAN BARAT	257	299	556
KALIMANTAN SELATAN	12	200	212
KALIMANTAN TENGAH		17	17
KALIMANTAN TIMUR	6	19	25
KALIMANTAN UTARA		4	4
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	13	11	24
KEPULAUAN RIAU	94	211	305
LAMPUNG	137	1224	1361
MALUKU		11	11
MALUKU UTARA	3	6	9
NUSA TENGGARA BARAT	192	101	293
NUSA TENGGARA TIMUR	48	836	884
PAPUA	1	7	8
PAPUA BARAT	1	1	2
PAPUA PEGUNUNGAN		1	1
PAPUA SELATAN	1		1
PAPUA TENGAH		3	3
RIAU	121	108	229
SULAWESI BARAT	1	103	104
SULAWESI SELATAN	10	462	472
SULAWESI TENGAH	11	53	64
SULAWESI TENGGARA	36	37	73
SULAWESI UTARA		66	66
SUMATERA BARAT	22	27	49
SUMATERA SELATAN	61	323	384
SUMATERA UTARA	89	295	384
TIDAK TERIDENTIFIKASI	36	40	76
GRAND TOTAL	15882	21762	37644

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK dan laporan dinas, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: Data sangat sementara

3. 10. 3. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Menurut Provinsi dan Program Kegiatan Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2024

PROVINI	KLASIFIKASI PROGRAM								
	PENEMPATAN BKK	PENEMPATAN LPPRT	PENEMPATAN LPTKS	PADAT KARYA	PENEMPATAN DISNAKER	PENEMPATAN ULD	TKM	TKS	Grand Total
ACEH		6							6
BALI	101	3	19	46		490			659
BANTEN	5567	91	58						5716
BENGKULU	26	17							43
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	53	519	159	4340	1848	2	97		7018
DKI JAKARTA		75	11						86
GORONTALO		15			126	17			158
JAMBI		15				68			83
JAWA BARAT	19	336	87	2884	10081	750	267	63	14487
JAWA TENGAH	517	528	266	19	1329	257	116		3032
JAWA TIMUR		505	23		3	208			739
KALIMANTAN BARAT	177	13	2			35	329		556
KALIMANTAN SELATAN		161				11	40		212
KALIMANTAN TENGAH		16				1			17
KALIMANTAN TIMUR	5	19	1						25
KALIMANTAN UTARA		4							4
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	16	8							24
KEPULAUAN RIAU		8	297						305
LAMPUNG		1307	5			49			1361
MALUKU		11							11
MALUKU UTARA		6				3			9
NUSA TENGGARA BARAT		12	281						293
NUSA TENGGARA TIMUR		831	53						884
PAPUA		7				1			8
PAPUA BARAT			2						2
PAPUA PEGUNUNGAN		1							1
PAPUA SELATAN			1						1
PAPUA TENGAH		3							3
RIAU		74	5	150					229
SULAWESI BARAT	1	103							104
SULAWESI SELATAN		454	17			1			472

PROVINSI	KLASIFIKASI PROGRAM								
	PENEMPATAN BKK	PENEMPATAN LPRT	PENEMPATAN LPTKS	PADAT KARYA	PENEMPATAN DISNAKER	PENEMPATAN ULD	TKM	TKS	Grand Total
SULAWESI TENGAH		47	12			5			64
SULAWESI TENGGARA		28	8		32	5			73
SULAWESI UTARA		66							66
SUMATERA BARAT		23			5	21			49
SUMATERA SELATAN		305	6		61	12			384
SUMATERA UTARA		115	212		1	56			384
TIDAK TERIDENTIFIKASI	45	10	21						76
GRAND TOTAL	6527	5742	1546	7439	13486	1992	849	63	37644

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK dan laporan dinas, diolah Pusdatik Kemnaker
Keterangan: Data sangat sementara

3.11 Data Pencari Kerja Terdaftar

3. 11. 1. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Karirhub Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Bulan Januari s.d. September Tahun 2024*

PROVINSI	JENIS KELAMIN		GRAND TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
ACEH	1.052	699	1.751
BALI	2.798	2.592	5.390
BANTEN	12.923	12.933	25.856
BENGKULU	850	700	1.550
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.566	1.579	3.145
DKI JAKARTA	5.767	4.344	10.111
GORONTALO	1.004	506	1.510
JAMBI	2.100	1.196	3.296
JAWA BARAT	77.490	87.818	165.308
JAWA TENGAH	21.727	27.168	48.895
JAWA TIMUR	17.339	18.979	36.318
KALIMANTAN BARAT	1.628	1.323	2.951
KALIMANTAN SELATAN	2.739	907	3.646

PROVINSI	JENIS KELAMIN		GRAND TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
KALIMANTAN TENGAH	3.677	1.418	5.095
KALIMANTAN TIMUR	2.697	766	3.463
KALIMANTAN UTARA	838	289	1.127
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	311	145	456
KEPULAUAN RIAU	1.348	1.235	2.583
LAMPUNG	7.190	9.923	17.113
MALUKU	2.309	835	3.144
MALUKU UTARA	10.671	2.966	13.637
NUSA TENGGARA BARAT	15.486	4.726	20.212
NUSA TENGGARA TIMUR	1.621	3.228	4.849
PAPUA	886	708	1.594
PAPUA BARAT	353	111	464
PAPUA BARAT DAYA	53	14	67
PAPUA PEGUNUNGAN	3		3
PAPUA SELATAN	17	5	22
PAPUA TENGAH	26	8	34
RIAU	3.840	1.309	5.149
SULAWESI BARAT	1.775	612	2.387
SULAWESI SELATAN	10.963	4.147	15.110
SULAWESI TENGAH	8.010	2.843	10.853
SULAWESI TENGGARA	4.255	1.709	5.964
SULAWESI UTARA	856	630	1.486
SUMATERA BARAT	2.709	2.482	5.191
SUMATERA SELATAN	4.680	2.947	7.627
SUMATERA UTARA	5.136	5.105	10.241
Grand Total	238.693	208.905	447.598

Sumber: Kemnaker Keterangan: Data sangat sementara

**3. 11. 2. Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar di Karirhub Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Bulan Januari s.d. September Tahun 2024***

PROVINSI	JENIS KELAMIN			GRAND TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI/PEREMPUAN	
ACEH	155	1	84	240
BALI	240	105	3.705	4.050
BANTEN	424	1.165	15.160	16.749
BENGKULU	56	2	150	208
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	315	1.172	6.076	7.563
DKI JAKARTA	1.469	769	15.789	18.027
GORONTALO	37		20	57
JAMBI	130	3	214	347
JAWA BARAT	1.997	24.964	15.323	42.284
JAWA TENGAH	793	2.619	27.741	31.153
JAWA TIMUR	786	1.891	4.189	6.866
KALIMANTAN BARAT	98	1.001	213	1.312
KALIMANTAN SELATAN	242	38	604	884
KALIMANTAN TENGAH	123	2	68	193
KALIMANTAN TIMUR	130	25	1.117	1.272
KALIMANTAN UTARA	33	2	28	63
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	46	5	95	146
KEPULAUAN RIAU	97	42	594	733
LAMPUNG	96	22	319	437
MALUKU	95		87	182
MALUKU UTARA	63	2	29	94
NUSA TENGGARA BARAT	66	3	343	412
NUSA TENGGARA TIMUR	149	11	353	513
PAPUA	66	1	64	131

PROVINSI	JENIS KELAMIN			GRAND TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI/PEREMPUAN	
PAPUA BARAT	81	1	40	122
PAPUA BARAT DAYA	39	4	6	49
PAPUA PEGUNUNGAN	47		118	165
PAPUA SELATAN	24		7	31
PAPUA TENGAH	48	2	15	65
RIAU	286	70	1.291	1.647
SULAWESI BARAT	36	2	116	154
SULAWESI SELATAN	222	7	929	1.158
SULAWESI TENGAH	2.670	2	394	3.066
SULAWESI TENGGARA	127	1	131	259
SULAWESI UTARA	213		200	413
SUMATERA BARAT	368	80	2.612	3.060
SUMATERA SELATAN	134	14	2.004	2.152
SUMATERA UTARA	342	148	1.843	2.333
Grand Total	12.343	34.176	102.071	148.590

Sumber: Kemnaker

Keterangan: Data sangat sementara

3. 11. 3. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja di Karirhub Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Bulan Januari s.d. September Tahun 2024*

PROVINSI	JENIS KELAMIN		GRAND TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
ACEH	2	2	4
BALI	8	4	12
BANTEN	51	34	85
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5	6	11
DKI JAKARTA	34	29	63
JAWA BARAT	47	38	85
JAWA TENGAH	19	24	43
JAWA TIMUR	6	14	20
KALIMANTAN TIMUR	2		2
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	2	3
KEPULAUAN RIAU	13	16	29

PROVINSI	JENIS KELAMIN		GRAND TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
LAMPUNG		1	1
NUSA TENGGARA TIMUR		2	2
PAPUA		1	1
RIAU	4		4
SULAWESI SELATAN	4	4	8
SULAWESI TENGAH	3		3
SULAWESI TENGGARA	1		1
SULAWESI UTARA		2	2
SUMATERA BARAT	2	1	3
SUMATERA SELATAN	2	4	6
SUMATERA UTARA	5	7	12
GRAND TOTAL	209	191	400

Sumber: Kemnaker

Keterangan: Data sangat sementara

BAB IV

Data Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tabel 4. 1 Jumlah Perusahaan Tendaftar WLKP yang Melaporkan Memiliki Struktur Skala Upah Menurut Provinsi dan Skala Usaha (Berdasarkan Jumlah TK)
s.d. 30 September 2024¹

No.	Provinsi	Skala Usaha (Berdasarkan Jumlah TK)					Total
		Mikro (3)	Kecil (4)	Menengah (5)	Besar (6)	Belum Teridentifikasi (7)	
(1)	(2)						
1	Aceh	55	75	92	57	1	280
2	Bali	368	1.073	1.261	371	8	3.081
3	Banten	661	1.339	1.924	1.096	18	5.038
4	Bengkulu	20	56	78	39	-	193
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	86	276	445	194	3	1.004
6	DKI Jakarta	4.094	7.224	8.355	4.605	74	24.352
7	Gorontalo	6	23	46	9	-	84
8	Jambi	87	128	242	137	-	594
9	Jawa Barat	1.604	2.781	3.688	2.768	29	10.870
10	Jawa Tengah	249	773	1.518	1.319	3	3.862
11	Jawa Timur	341	1.046	1.764	1.254	8	4.413
12	Kalimantan Barat	36	116	193	203	-	548
13	Kalimantan Selatan	49	138	199	141	7	534
14	Kalimantan Tengah	39	81	125	135	1	381
15	Kalimantan Timur	128	264	430	277	1	1.100
16	Kalimantan Utara	6	15	34	38	-	93
17	Kepulauan Bangka Belitung	24	83	100	48	-	255
18	Kepulauan Riau	188	513	649	318	4	1.672
19	Lampung	47	123	160	93	1	424
20	Maluku	849	186	81	25	-	1.141
21	Maluku Utara	10	14	13	8	1	46
22	Nusa Tenggara Barat	45	149	170	49	1	414
23	Nusa Tenggara Timur	32	66	94	21	-	213
24	Papua	13	24	46	12	-	95

¹ Perusahaan yang terklasifikasi memiliki SUSU merupakan perusahaan yang terdaftar WLKP, melapor memiliki SUSU, melapor min. 1 Tenaga Kerja, dan berstatus sebagai Perusahaan Pusat

No.	Provinsi	Skala Usaha (Berdasarkan Jumlah TK)						Total	
		Mikro (3)	Kecil (4)	Menengah (5)	Besar (6)	Belum Teridentifikasi (7)			
(1)	(2)							(7)	(8)
25	Papua Barat	7	6	22	8	-			43
26	Papua Barat Daya	6	23	23	12	-			64
27	Papua Pegunungan	-	1	-	-	-			1
28	Papua Selatan	2	2	6	1	-			11
29	Papua Tengah	22	31	33	24	-			110
30	Riau	521	670	667	335	3			2.196
31	Sulawesi Barat	5	7	15	9	-			36
32	Sulawesi Selatan	116	221	275	144	3			759
33	Sulawesi Tengah	24	56	66	63	1			210
34	Sulawesi Tenggara	30	59	58	29	-			176
35	Sulawesi Utara	21	40	89	58	-			208
36	Sumatera Barat	81	187	186	96	-			550
37	Sumatera Selatan	81	108	195	172	-			556
38	Sumatera Utara	253	500	629	423	-			1.805
39	Belum Teridentifikasi	51	98	85	15	-			249
TOTAL		10.257	18.575	24.056	14.606	167			67.661

Sumber: Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), update 30 September 2024

Tabel 4. 2 Jumlah Perusahaan Terdaftar WLKP yang Melaporkan Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Menurut Provinsi dan Skala Usaha (Berdasarkan Jumlah TK) s.d. 30 September 2024¹

No.	Provinsi (2)	Skala Usaha (Berdasarkan Jumlah TK)					Total	
		Mikro (3)	Kecil (4)	Menengah (5)	Besar (6)	Tidak Teridentifikasi (7)	(8)	
1	Aceh	29	56	77	43	-	205	
2	Bali	120	372	820	251	2	1.565	
3	Banten	284	686	1.455	810	14	3.249	
4	Bengkulu	11	51	77	31	-	170	
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	40	159	341	145	3	688	
6	DKI Jakarta	1.719	3.675	6.153	3.708	38	15.293	
7	Gorontalo	6	21	38	8	-	73	
8	Jambi	63	96	168	82	-	409	
9	Jawa Barat	773	1.654	3.021	1.942	17	7.407	
10	Jawa Tengah	138	501	1.167	873	3	2.682	
11	Jawa Timur	230	758	1.570	980	3	3.541	
12	Kalimantan Barat	20	51	136	156	-	363	
13	Kalimantan Selatan	18	64	158	105	2	347	
14	Kalimantan Tengah	15	44	94	96	-	249	
15	Kalimantan Timur	53	151	353	218	-	775	
16	Kalimantan Utara	1	11	22	30	-	64	
17	Kepulauan Bangka Belitung	17	58	109	38	-	222	
18	Kepulauan Riau	100	267	500	251	2	1.120	
19	Lampung	28	85	137	81	1	332	
20	Maluku	26	51	55	19	-	151	
21	Maluku Utara	5	6	9	5	-	25	
22	Nusa Tenggara Barat	16	57	100	28	-	201	
23	Nusa Tenggara Timur	11	23	55	17	-	106	
24	Papua	7	18	29	7	-	61	

¹ Perusahaan yang terklasifikasi memiliki PP merupakan perusahaan yang terdaftar WLKP, melapor memiliki PP, melapor min. 1 Tenaga Kerja, dan berstatus sebagai Perusahaan Pusat

No.	Provinsi	Skala Usaha (Berdasarkan Jumlah TK)						Total
		Mikro (3)	Kecil (4)	Menengah (5)	Besar (6)	Tidak Teridentifikasi (7)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
25	Papua Barat	3	5	14	6	-	28	
26	Papua Barat Daya	4	14	20	12	-	50	
27	Papua Selatan	1	5	5	-	-	11	
28	Papua Tengah	8	16	20	16	-	60	
29	Riau	322	479	475	208	1	1.485	
30	Sulawesi Barat	7	6	7	-	-	20	
31	Sulawesi Selatan	42	110	216	106	-	474	
32	Sulawesi Tengah	11	37	61	53	-	162	
33	Sulawesi Tenggara	8	23	40	25	-	96	
34	Sulawesi Utara	13	43	73	47	-	176	
35	Sumatera Barat	33	102	161	54	-	350	
36	Sumatera Selatan	50	105	196	105	-	456	
37	Sumatera Utara	137	331	485	269	-	1.222	
38	Belum Teridentifikasi	26	65	45	9	-	145	
Total		4.395	10.256	18.462	10.834	86	44.033	

Sumber: Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), update 30 September 2024

Tabel 4. 3 Jumlah Perusahaan Terdaftar WLKP yang Melaporkan Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Menurut Provinsi dan Skala Usaha (Berdasarkan Jumlah TK)
s.d. 30 September 2024¹

No.	Provinsi (2)	Skala Usaha (Berdasarkan Jumlah TK)					Total	
		Mikro (3)	Kecil (4)	Menengah (5)	Besar (6)	Belum teridentifikasi (7)	(8)	
1	Aceh	23	22	36	28	1	110	
2	Bali	76	203	260	129	2	670	
3	Banten	131	279	345	402	7	1.164	
4	Bengkulu	3	12	26	19	-	60	
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	26	75	107	70	3	281	
6	DKI Jakarta	692	1.287	1.159	1.060	16	4.214	
7	Gorontalo	2	2	6	2	-	12	
8	Jambi	17	32	79	72	-	200	
9	Jawa Barat	343	602	768	1.103	13	2.829	
10	Jawa Tengah	58	188	343	498	1	1.088	
11	Jawa Timur	101	264	490	537	1	1.393	
12	Kalimantan Barat	13	29	56	53	1	152	
13	Kalimantan Selatan	13	22	42	47	1	125	
14	Kalimantan Tengah	11	31	34	48	-	124	
15	Kalimantan Timur	31	69	132	80	1	313	
16	Kalimantan Utara	3	7	14	8	-	32	
17	Kepulauan Bangka Belitung	11	21	15	19	-	66	
18	Kepulauan Riau	57	124	160	92	5	438	
19	Lampung	5	28	57	52	-	142	
20	Maluku	45	16	17	6	-	84	
21	Maluku Utara	2	1	3	1	-	7	
22	Nusa Tenggara Barat	10	42	53	14	-	119	
23	Nusa Tenggara Timur	9	23	23	4	-	59	

¹ Perusahaan yang terklasifikasi memiliki PKB merupakan perusahaan yang terdaftar WLKP, melapor memiliki PKB, melapor min. 1 Tenaga Kerja, dan berstatus sebagai Perusahaan Pusat

No.	Provinsi	Skala Usaha (Berdasarkan Jumlah TK)					Total	
		Mikro (3)	Kecil (4)	Menengah (5)	Besar (6)	Belum teridentifikasi (7)	(8)	
(1)	(2)							
24	Papua	5	7	11	2	-	2	25
25	Papua Barat	1	3	9	3	-	3	16
26	Papua Barat Daya	4	5	13	5	-	5	27
27	Papua Selatan	1	1	3	1	-	1	6
28	Papua Tengah	1	7	10	6	-	6	24
29	Riau	129	135	197	168	2	168	631
30	Sulawesi Barat	3	4	5	8	-	8	20
31	Sulawesi Selatan	36	66	72	59	1	59	234
32	Sulawesi Tengah	7	17	22	14	1	14	61
33	Sulawesi Tenggara	6	12	9	8	-	8	35
34	Sulawesi Utara	7	19	37	25	-	25	88
35	Sumatera Barat	31	38	47	49	-	49	165
36	Sumatera Selatan	33	29	68	99	-	99	229
37	Sumatera Utara	60	101	171	226	-	226	558
38	Tidak Teridentifikasi	10	36	32	8	-	8	86
Total		2.016	3.859	4.931	5.025	56	5.025	15.887

Sumber: Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), update 30 September 2024

Tabel 4. 4 Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Hubungan Industrial s.d. 30 September 2024^[1]

No.	Tahun	Bulan	Jenis Perselisihan					Jumlah
			Perselisihan Hak	Perselisihan Kepentingan	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja	Perselisihan Antar SP/SB Dalam Satu Perusahaan	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2023	Januari	46	-	412	-	32	490
2	2023	Februari	17	18	423	-	40	498
3	2023	Maret	30	8	573	-	25	636
4	2023	April	10	-	125	-	5	140
5	2023	Mei	5	-	347	-	30	382
6	2023	Juni	51	7	328	-	14	400
7	2023	Juli	32	9	460	-	36	537
8	2023	Agustus	36	21	462	-	36	555
9	2023	September	29	1	414	-	29	473
10	2023	Oktober	39	9	517	-	67	632
11	2023	November	208	-	525	-	103	836
12	2023	Desember	35	10	309	-	17	371
13	2024	Januari	46	-	574	-	38	658
14	2024	Februari	29	-	429	-	40	498
15	2024	Maret	29	-	286	-	69	384
16	2024	April	137	-	210	-	10	357
17	2024	Mei	30	-	257	-	-	287
18	2024	Juni	13	-	290	-	13	316
19	2024	Juli	19	-	265	-	3	287
20	2024	Agustus	3	4	224	-	9	240
21	2024	September	17	-	156	-	8	181
Total			861	87	7.586	-	624	9.158

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), diolah oleh Pusdatik Kemnaker, update 30 September 2024

^[1] Pengumpulan Data Perselisihan Hubungan Industrial dilakukan pada 29 website SIPP dengan menggunakan metode *crawling* oleh tim Pusdatik Kemnaker

Tabel 4. 5 Jumlah Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia Menurut Provinsi, Status Keaktifan, dan Segmen Kepesertaan
s.d Agustus 2024

NO.	PROVINSI	Kepesertaan Aktif				Kepesertaan Non Aktif		
		Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Jasa Konstruksi	Jumlah	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Jumlah
1	Aceh	309,127	57,930	77,650	444,707	118,572	8,327	126,899
2	Sumatera Utara	990,868	441,619	415,773	1,848,260	919,185	60,235	979,420
3	Sumatera Barat	266,904	212,929	97,263	577,096	210,418	17,631	228,049
4	Riau	636,345	286,263	145,784	1,068,392	966,908	23,371	990,279
5	Jambi	259,073	172,751	55,906	487,730	382,781	14,163	396,944
6	Sumatera Selatan	498,103	93,025	161,989	753,117	363,051	23,559	386,610
7	Bengkulu	117,318	73,686	25,449	216,453	73,244	8,145	81,389
8	Lampung	368,683	59,711	39,020	467,414	224,914	10,696	235,610
9	Kep. Bangka Belitung	110,714	35,282	23,161	169,157	97,169	4,128	101,297
10	Kepulauan Riau	420,938	105,053	51,628	577,619	735,023	17,045	752,068
11	DKI Jakarta	5,665,128	1,257,485	798,263	7,720,876	5,773,243	245,704	6,018,947
12	Jawa Barat	3,430,135	694,529	411,903	4,536,567	3,414,631	181,112	3,595,743
13	Jawa Tengah	2,700,154	569,550	473,522	3,743,226	1,752,069	74,759	1,826,828
14	DI Yogyakarta	384,572	110,485	62,709	557,766	229,557	17,666	247,223
15	Jawa Timur	3,030,485	730,545	807,263	4,568,293	1,631,691	138,590	1,770,281
16	Banten	1,640,166	751,264	338,289	2,729,719	1,598,583	75,937	1,674,520
17	Bali	561,399	365,703	57,348	984,450	367,364	24,760	392,124
18	Nusa Tenggara Barat	254,385	180,767	82,263	517,415	76,269	9,213	85,482
19	Nusa Tenggara Timur	172,037	125,717	46,984	344,738	49,978	35,741	85,719
20	Kalimantan Barat	420,924	150,771	52,925	624,620	495,924	12,926	508,850
21	Kalimantan Tengah	374,013	122,483	75,045	571,541	684,859	23,372	708,231
22	Kalimantan Selatan	357,571	160,077	50,171	567,819	358,831	14,531	373,362
23	Kalimantan Timur	694,090	313,735	197,435	1,205,260	1,071,493	23,210	1,094,703
24	Kalimantan Utara	112,751	90,136	23,819	226,706	190,212	4,073	194,285

NO.	PROVINSI	Kepesertaan Aktif					Kepesertaan Non Aktif			
		Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Jasa Konstruksi	Jumlah	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Jumlah		
25	Sulawesi Utara	313,700	156,773	29,813	500,286	149,694	8,675	158,369		
26	Sulawesi Tengah	327,905	116,253	63,480	507,638	174,981	9,990	184,971		
27	Sulawesi Selatan	592,686	254,858	133,225	980,769	288,814	22,772	311,586		
28	Sulawesi Tenggara	160,511	79,319	33,132	272,962	72,226	2,473	74,699		
29	Gorontalo	93,373	103,037	37,906	234,316	24,835	2,445	27,280		
30	Sulawesi Barat	21,764	15,435	15,465	52,664	4,293	1,264	5,557		
31	Maluku	90,345	49,329	24,908	164,582	77,220	8,861	86,081		
32	Maluku Utara	176,832	39,671	23,090	239,593	103,649	6,661	110,310		
33	Papua Barat	112,329	137,952	65,179	315,460	132,117	7,761	139,878		
34	Papua	181,368	87,567	143,241	412,176	151,497	11,829	163,326		
	Jumlah	25,846,696	8,201,690	5,141,001	39,189,387	22,965,295	1,151,625	24,116,920		

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan

Tabel 4. 6 Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dan Jenis Penyelesaiannya s.d Juni 2024

Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jenis Penyelesaian Perselisihan					Sisa Kasus
		Bipartit	Mediasi	Konsiliasi	Arbitrasi	Hakim HI	
Perselisihan Hak	791	257	386	-	-	-	148
Perselisihan Kepentingan	94	27	49	-	-	-	18
Perselisihan PHK	1,899	528	1,045	-	-	-	326
Perselisihan Antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh	19	5	11	-	-	-	3
Total	2,803	817	1,491	-	-	-	495

Sumber:Kemnaker RI

Tabel 4. 10 Jumlah Tenaga Kerja yang Ter-PHK Menurut Provinsi
Periode Januari s.d. Juni Tahun 2024

No.	Provinsi	Tenaga Kerja ter-PHK*					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Aceh			133	181	198	203
2	Sumatera Utara			508	508	535	539
3	Sumatera Barat		1	1	1	5	327
4	Riau	87	173	406	786	807	833
5	Jambi				82	82	100
6	Sumatera Selatan						
7	Bengkulu						
8	Lampung				18	18	23
9	Bangka Belitung	1	9	25	50	1,423	1,527
10	Kepulauan Riau	34	62	82	98	316	341
11	DKI Jakarta		3,651	5,225	4,807	5,574	7,469

No.	Provinsi	Tenaga Kerja ter-PHK*					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
12	Jawa Barat	306	654	1,690	2,756	4,327	5,155
13	Jawa Tengah	2,807	2,886	2,955	3,648	3,795	4,275
14	DI. Yogyakarta				68	137	292
15	Jawa Timur		119	186	191	754	819
16	Banten	6	8	927	5,078	5,859	6,135
17	Bali	1	1	1	2	2	19
18	Nusa Tenggara Barat						
19	Nusa Tenggara Timur		27	27	27	27	27
20	Kalimantan Barat					785	785
21	Kalimantan Tengah			61	167	167	298
22	Kalimantan Selatan				159	159	246
23	Kalimantan Timur						109
24	Kalimantan Utara						78
25	Sulawesi Utara					27	27
26	Sulawesi Tengah					1,647	1,812
27	Sulawesi Selatan		4	40	74	202	227
28	Sulawesi Tenggara	72	72	101	101	326	348
29	Gorontalo	18	18	18	18	18	18
30	Sulawesi Barat						
31	Maluku		9	9	9	32	32
32	Maluku Utara						
33	Papua Barat						
34	Papua						
Jumlah		3,332	7,694	12,395	18,829	27,222	32,064

*data sementara

Sumber : Kemnaker RI (Laporan Bulanan Ditjen PHI & Jamsostek)

Catatan: Jumlah tenaga kerja ter-PHK merupakan jumlah akumulasi dari bulan sebelumnya di tahun berjalan

Tabel 4. 7 Upah Minimum Provinsi di Indonesia tahun 2024

No	Provinsi	Upah Minimum (Rp)
1	Aceh	3,460,672.00
2	Sumatera Utara	2,809,915.00
3	Sumatera Barat	2,811,449.27
4	Riau	3,294,625.56
5	Jambi	3,037,121.85
6	Sumatera Selatan	3,456,874.00
7	Bengkulu	2,507,079.24
8	Lampung	2,716,497.00
9	Bangka Belitung	3,640,000.00
10	Kepulauan Riau	3,402,492.00
11	DKI Jakarta	5,067,381.00
12	Jawa Barat	2,057,495.00
13	Jawa Tengah	2,036,947.00
14	DI. Yogyakarta	2,125,897.61
15	Jawa Timur	2,165,244.30
16	Banten	2,727,812.11
17	Bali	2,813,672.00
18	Nusa Tenggara Barat	2,444,067.00
19	Nusa Tenggara Timur	2,186,826.00
20	Kalimantan Barat	2,702,616.00
21	Kalimantan Tengah	3,261,616.00
22	Kalimantan Selatan	3,282,812.21
23	Kalimantan Timur	3,360,858.00
24	Kalimantan Utara	3,361,653.00
25	Sulawesi Utara	3,545,000.00
26	Sulawesi Tengah	2,736,698.00
27	Sulawesi Selatan	3,434,298.00
28	Sulawesi Tenggara	2,885,964.04
29	Gorontalo	3,025,100.00
30	Sulawesi Barat	2,914,958.08
31	Maluku	2,949,953.00
32	Maluku Utara	3,200,000.00
33	Papua Barat	3,393,500.00
34	Papua	4,024,270.00
35	Papua Tengah	4,024,270.00
36	Papua Pegunungan	4,024,270.00
37	Papua Selatan	4,024,270.00
38	Papua Barat Daya	3,393,500.00
	Rata-rata	3,113,359.85

Sumber: Kemnaker RI

Tabel 4. 8 Jumlah Kasus Mogok Kerja, Tenaga Kerja yang Terlibat, dan Jam Kerja yang Hilang di Indonesia menurut Provinsi
Periode Januari s.d Juni 2024

No.	Provinsi	Kasus	Tenaga Kerja yang Terlibat (orang)	Jam Kerja yang Hilang (jam)
1	Aceh			
2	Sumatera Utara	3	180	1,440
3	Sumatera Barat			
4	Riau			
5	Jambi			
6	Sumatera Selatan	1	250	2,000
7	Bengkulu			
8	Lampung			
9	Bangka Belitung			
10	Kepulauan Riau	2	250	2,000
11	DKI Jakarta	35	850	6,800
12	Jawa Barat	22	630	5,040
13	Jawa Tengah	2	90	720
14	DI. Yogyakarta	1	120	960
15	Jawa Timur	1	50	400
16	Banten	5	130	1,040
17	Bali			
18	Nusa Tenggara Barat			
19	Nusa Tenggara Timur			
20	Kalimantan Barat	2	65	520
21	Kalimantan Tengah	10	300	2,400
22	Kalimantan Selatan			
23	Kalimantan Timur			
24	Kalimantan Utara			
25	Sulawesi Utara	1	40	320
26	Sulawesi Tengah			
27	Sulawesi Selatan	9	400	3,200
28	Sulawesi Tenggara			
29	Gorontalo			
30	Sulawesi Barat			
31	Maluku			
32	Maluku Utara			
33	Papua Barat			
34	Papua			
Jumlah		94	3,355	26,840

Sumber : Kemnaker RI (Laporan Bulanan Ditjen PHI & Jamsostek)

Tabel 4. 9 Jumlah Mediator Hubungan Industrial Menurut Provinsi dan Jabatan
s.d. Juni Tahun 2024

Provinsi	Fungsional				Jumlah
	Pertama	Muda	Madya	Utama	
Aceh	1	14	0	0	15
Sumatera Utara	6	33	12	0	51
Sumatera Barat	2	23	5	0	30
Riau	3	24	7	0	34
Jambi	0	24	0	0	24
Sumatera Selatan	6	24	4	0	34
Bengkulu	3	7	4	0	14
Lampung	0	22	4	0	26
Bangka Belitung	5	13	3	0	21
Kepulauan Riau	5	17	1	0	23
DKI Jakarta	32	12	15	0	59
Jawa Barat	39	57	21	0	117
Jawa Tengah	44	49	14	0	107
DI. Yogyakarta	6	10	3	0	19
Jawa Timur	32	66	7	0	105
Banten	5	26	2	0	33
Bali	1	23	4	1	29
Nusa Tenggara Barat	6	15	0	0	21
Nusa Tenggara Timur	0	20	3	0	23
Kalimantan Barat	10	12	2	0	24
Kalimantan Tengah	5	20	2	0	27
Kalimantan Selatan	2	11	3	0	16
Kalimantan Timur	8	25	1	0	34
Kalimantan Utara	2	9	0	0	11
Sulawesi Utara	1	8	1	0	10
Sulawesi Tengah	3	17	0	0	20
Sulawesi Selatan	7	30	8	0	45
Sulawesi Tenggara	2	15	5	0	22
Gorontalo	1	10	0	0	11
Sulawesi Barat	1	3	1	0	5
Maluku	5	7	0	0	12
Maluku Utara	0	4	0	0	4
Papua Barat	0	0	0	0	0
Papua	0	1	0	0	1
Pusat	18	61	25	0	104
Jumlah	261	712	157	1	1,131

Sumber : Kemnaker RI (Laporan Bulanan Ditjen PHI & Jamsostek)

Catatan: Jumlah Mediator HI pada periode ini masih sama dengan jumlah Mediator HI update s.d. April tahun 2024

BAB V

Data Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3

5. 1 Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pengujian K3

Tabel 5.1. 1 Data Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia Menurut Provinsi Per-November 2024

No.	Provinsi	Bidang	UPTD/Korwil	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Tidak membentuk UPT	Kesepakatan Hasil Rakorda
2	Sumatera Utara	Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan	6 UPT	Pergub No. 6 Tahun 2018
3	Sumatera Barat	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan	3 UPT	
4	Riau	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Tidak membentuk UPT	Pergub. No. 33 Tahun 2020 TENTANG PENCABUTAN PERGUB 50 TAHUN 2017 TTG PEMBENTUKAN UPT
5	Kep. Riau	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub KEPRI No. 53 Tahun 2017
6	Jambi	Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	3 UPTD	Pergub No. 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Disnakertrans Prov. Jambi
7	Sumatera Selatan	Bidang Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	Belum Terbentuk	Perda Prov. Sumsel No. 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pergub Prov. Sumsel No. 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
8	Bangka Belitung	Bidang Pembinaan	1 Korwil	

No.	Provinsi	Bidang	UPTD/Korwil	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengawasan Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, dan Jamsos		
9	Bengkulu	Bidang Hubungan Industrial Pengawasan Ketenagakerjaan	3 UPTD	Pergub Bengkulu No.67 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
10	Lampung	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Belum Terbentuk	
11	DKI Jakarta	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Tidak membentuk UPT	Pergub No. 271 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Struktur Tatakerja diperbaharui dengan Pergub No. 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
12	Jawa Barat	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	5 UPTD	1. PERDA PRO JABAR NO. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Jabar 2. PERGUB JABAR NO. 46 TAHUN 2016 Tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di lingkungan Pemprov. Jabar 3. PERGUB JABAR NO. 88 TAHUN 2016 Tentang Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Provinsi	Bidang	UPTD/Korwil	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				4. PERGUB JABAR NO. 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan UPTD Disnakertrans 5. PERGUB JABAR NO. 78 Tahun 2017 Tentang Tupoksi di UPTD Disnakertrans
13	Banten	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	4 UPTD	Pergub No 19 Tahun 2018 Tentang UPT Cabang Dinas
14	Jawa Tengah	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	6 Satwasnaker (Kelas B)	Pergub No. 103 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPT Disnakertrans Provinsi Jateng
15	DI Yogyakarta	Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tidak membentuk UPT	Pergub DIY No. 62 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	Jawa Timur	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	6 Korwil	Dasar Hukum KoRwil SK Kepala Dinas No 560/1140/108.5/2017 tentang Penunjukan Pengurus Korwil Pengawasan KK di Jatim
17	Bali	Bidang BHI dan Pengawasan Tenaga Kerja	Tidak membentuk UPT	Perda No 10 Tahun 2016 dan Pergub No 84
18	NTB	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub No. 53 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Daerah Provinsi NTB

No.	Provinsi	Bidang	UPTD/Korwil	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	NTT	Bidang PHI dan Pengawasan Ketenagakerjaan	4 Korwil	
20	Kalimantan Barat	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	dalam proses
21	Kalimantan Tengah	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub No. 57 Tahun 2017
22	Kalimantan Selatan	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	4 UPTD	Pergub No 143 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
23	Kalimantan Timur	Bidang Pembinaan dan Pengawasan	3 Korwil	
24	Kalimantan Utara	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan		Pergub No. 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara
25	Sulawesi Utara	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	1 UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja 4 Korwil	Perda No. 04 Tahun 2016 , dan SK Kepala Dinas No. 560/DTKT.V/02/2017 Tahun 2017
26	Sulawesi Barat	Bidang Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub Sulbar No. 41 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat
27	Sulawesi Tengah	Bidang Pembinaan dan	2 UPTD	

No.	Provinsi	Bidang	UPTD/Korwil	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3		
28	Sulawesi Tenggara	Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja	Belum Terbentuk	Pergub No. 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Disnaker Sultra
29	Sulawesi Selatan	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	4 UPTD	Pergub Sulsel No. 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
30	Gorontalo	Bidang Transmigrasi	3 Korwil	Perda No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Daerah Provinsi Gorontalo
31	Maluku	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	5 Balai Pengawas Ketenagakerjaan	Pergub No. 39 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan UPTD Wasnaker Maluku Utara
32	Maluku Utara	Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub No. 39 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan UPTD Wasnaker Maluku Utara
33	Papua Barat	Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub masih dalam proses

No.	Provinsi	Bidang	UPTD/Korwil	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	Papua	Tidak ada bidang pengawasan ketenagakerjaan	1 UPTD	

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Keterangan:

- Kompilasi administrasi dari Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi

Tabel 5.1. 2 Data Lembaga Uji K3 di Direktorat Bina Pengujian K3 Per-November 2024

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
(1)	(2)	(3)
1	Balai K3 Medan	Jl. KL Yos Sudarso Km. 11,5 No.64, Titi Papan, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20244
2	Balai K3 Samarinda	Jl. Sentosa No.9, Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242
3	Balai Besar K3 Jakarta	Jl. A. Yani No.69 - 70, RT.2/RW.7, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510
4	Balai K3 Makassar	Jalan KH. Abdul Jabbar Akhsiri No 35 KM 17, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242
5	Balai K3 Bandung	Jl. Golf Raya No.34, Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40294
6	UPT K2 Disnakertrans Prov. Jawa Timur	Jl. Dukuh Menanggal No.122, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60234
7	UPTD Balai K3 Prov. D.I Yogyakarta	Jl. Ireda No.38, Keparak, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152
8	UPTD Balai Hiperkes dan KK Prov. Sumatera Selatan	JL. AHMAD YANI NO. 108-16, ULU PLAJU, PALEMBANG , SUMATERA SELATAN 30265
9	UPTD Balai K3 Prov. Sumatera Barat	JL. Khotib Sulaeman No.25317, Ulak Karang Sel., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173
10	UPT Laboratorium Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Barat	Jl. Imam Bonjol No.390, Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243
11	UPT Pusat Hiperkes dan KK Provinsi DKI Jakarta	Jl. A. Yani No.69 - 70, RT.2/RW.7, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510
12	UPTD Hyperkes dan KK Prov. Bali	Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80239
13	UPTD Balai Keselamatan Kerja Prov. Jawa Tengah	Jl. Ngesrep Bar. III No.44, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263
14	UPTD Balai Hiperkes dan KK Prov. Maluku	Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku
15	UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja dan Hiperkes Prov. Sulawesi Utara	Jl. 17 Agustus, Manado, Teling Atas, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara
16	UPTD Balai K3 Prov. Lampung	JL. GATOT SUBROTO NO. 44 PAHOMAN

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
(1)	(2)	(3)
17	UPTD Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan	Jl. Brigjen H. Hasan Basry No.56, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
18	UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja Prov. Nusa Tenggara Barat	Jl. Majapahit No. 29 A Mataram, Lombok NTB

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5. 2 Perusahaan yang Terdaftar di WLKP Online

Tabel 5.2. 1 Jumlah Perusahaan Terdaftar WLKP Online di Indonesia Menurut Provinsi Dan Skala Usaha (Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja) s.d. 30 September 2024

No.	Provinsi	Skala Usaha					Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Belum Teridentifikasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	28.117	4.267	847	355	4.111	37.697
2	BALI	56.601	15.240	4291	1185	5.668	82.985
3	BANTEN	101.687	26.588	7023	3226	16.904	155.428
4	BENGKULU	14.940	2.160	493	222	1.369	19.184
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	25.176	7.108	1744	736	3.958	38.722
6	DKI JAKARTA	231.789	65.887	21.335	10150	55.020	384.181
7	GORONTALO	6.181	1.178	301	106	764	8.530
8	JAMBI	20.532	3.108	1016	523	3.254	28.433
9	JAWA BARAT	269.571	76.791	16.595	8117	38.921	409.995
10	JAWA TENGAH	123.555	31.483	7.978	4.005	19.088	186.109
11	JAWA TIMUR	200.301	44558	10364	4705	30538	290.466
12	KALIMANTAN BARAT	35.817	5.278	1183	858	4.705	47.841
13	KALIMANTAN SELATAN	31.334	5.076	1.220	771	4.098	42.499
14	KALIMANTAN TENGAH	21.295	2.881	729	661	2.402	27.968
15	KALIMANTAN TIMUR	41.367	6.704	2.077	1.547	7.943	59.638
16	KALIMANTAN UTARA	9.143	1.044	254	180	855	11.476
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	10.566	2.455	603	253	1.229	15.106
18	KEPULAUAN RIAU	28.221	5.319	1896	783	5.766	41.985
19	LAMPUNG	40.011	7.084	1.337	643	4.544	53.619
20	MALUKU	10.429	1221	316	146	965	13.077
21	MALUKU UTARA	7.728	1.089	184	113	810	9.924
22	NUSA TENGGARA BARAT	25.873	5.495	1.046	352	2.312	35.078
23	NUSA TENGGARA TIMUR	30.964	5.146	824	231	1.844	39.009
24	PAPUA	9.659	1.690	292	121	502	12.264
25	PAPUA BARAT	7.515	842	117	59	528	9.061
26	PAPUA BARAT DAYA	4.165	551	138	67	452	5.373
27	PAPUA PEGUNUNGAN	3.191	632	63	4	46	3.936
28	PAPUA SELATAN	2.779	481	46	27	342	3.675
29	PAPUA TENGAH	3.283	822	134	85	190	4.514
30	RIAU	39.945	6.419	2.097	1.309	6.798	56.568
31	SULAWESI BARAT	9.746	1.342	156	82	524	11.850
32	SULAWESI SELATAN	68.504	11.198	2.012	1043	5.183	87.940
33	SULAWESI TENGAH	22.801	3.087	677	303	2.063	28.931
34	SULAWESI TENGGARA	21.612	3.287	621	281	2.214	28.015
35	SULAWESI UTARA	16.291	3.510	814	376	1.949	22.940
36	SUMATERA BARAT	30.460	5.002	1.191	448	3.761	40.862
37	SUMATERA SELATAN	38.094	7.700	1.702	991	4.694	53.181
38	SUMATERA UTARA	58.546	11.825	3.193	1.899	11.621	87.084
39	TIDAK TERIDENTIFIKASI	997	437	176	30	245.221	246.861
TOTAL		1.708.786	385.985	97.085	46.993	503.156	2.742.005

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, update sampai dengan 30 September 2024

Keterangan:

- Perusahaan yang dihitung merupakan Perusahaan terdaftar di WLKP
- Penentuan skala perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dilaporkan, dengan kriteria:

Skala Perusahaan	Kriteria
Mikro	Memiliki 1-4 Tenaga Kerja
Kecil	Memiliki 5-19 Tenaga Kerja

Menengah	Memiliki 20-99 Tenaga Kerja
Besar	Memiliki ≥ 100 Tenaga Kerja
Belum Teridentifikasi	Belum atau Tidak Melaporkan Informasi Tenaga Kerja

- Perhitungan jumlah Tenaga Kerja di perusahaan terdaftar WLKP menggunakan 2 metode perhitungan sebagai berikut:
 - o Apabila perusahaan sudah melaporkan data detail tenaga kerja di WLKP, maka jumlah TK dihitung berdasarkan jumlah TK yang sudah dilaporkan;
 - o Apabila perusahaan belum melaporkan data detail tenaga kerja di WLKP dan data perusahaan tersebut berasal dari OSS-BKPM, maka jumlah TK dihitung berdasarkan nilai agregasi TK & TKA yang terdapat pada aplikasi OSS-BKPM.
- Pengklasifikasian Wilayah di perusahaan terdaftar WLKP menggunakan 2 metode pengklasifikasian sebagai berikut:
 - o Apabila perusahaan sudah melaporkan data wilayah operasional di WLKP (kode pos, kelurahan, kecamatan, kab/kota, provinsi), maka pengklasifikasian wilayah berdasarkan informasi wilayah operasional yang sudah dilaporkan;
 - o Apabila perusahaan belum melaporkan data wilayah operasional di WLKP (kode pos, kelurahan, kecamatan, kab/kota, provinsi) dan data perusahaan tersebut berasal dari OSS- BKPM, maka pengklasifikasian wilayah berdasarkan informasi wilayah operasional yang terdapat pada aplikasi OSS-BKPM.
- Provinsi Tidak Teridentifikasi berarti perusahaan belum atau tidak melaporkan informasi wilayah

5.3 Lembaga K3

**Tabel 5.3. 1 Jumlah Lembaga K3 Menurut Provinsi dan Bidang Jasa
s.d. 30 September 2024**

No.	Provinsi	Bidang Jasa				Jumlah
		Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3	Konsultan dan Pembinaan K3	Pemeriksaan dan Pengujian Teknik K3	Pemeriksaan/Pengujian dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH			3	4	7
2	BALI	1	1	29	4	35
3	BANTEN	23	60	116	39	238
4	BENGKULU				2	2
5	DI YOGYAKARTA	2	50	18	4	74
6	DKI JAKARTA	74	177	228	81	560
7	GORONTALO				1	1
8	JAMBI			2	5	7
9	JAWA BARAT	38	163	310	103	614
10	JAWA TENGAH	4	37	88	34	163
11	JAWA TIMUR	46	93	108	59	306
12	KALIMANTAN BARAT			20	4	24
13	KALIMANTAN SELATAN	1		6	2	9
14	KALIMANTAN TENGAH			1	1	2
15	KALIMANTAN TIMUR		33	42	38	113
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			4	2	6
17	KEPULAUAN RIAU		42	63	14	119
18	LAMPUNG	3	1	11	5	20
19	NUSA TENGGARA BARAT			1	4	5
20	PAPUA BARAT DAYA				2	2
21	PAPUA TENGAH		2			2
22	RIAU	11	34	55	22	122
23	SULAWESI SELATAN		13	18	7	38
24	SULAWESI TENGAH		1			1

No.	Provinsi	Bidang Jasa				Jumlah
		Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3	Konsultan dan Pembinaan K3	Pemeriksaan dan Pengujian Teknik K3	Pemeriksaan/Pengujian dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	SULAWESI TENGGARA				4	4
26	SULAWESI UTARA		1	2	2	5
27	SUMATERA BARAT		12	7	2	21
28	SUMATERA SELATAN		16	13	12	41
29	SUMATERA UTARA	47	23	48	24	142
TOTAL		250	759	1.193	481	2.683

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.4 Perusahaan Menerapkan SMK3

**Tabel 5.4. 1 Jumlah Perusahaan Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3) Menurut Provinsi
Periode Januari s.d. Oktober 2024**

No.	Provinsi	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Aceh	29
2	Bali	48
3	Banten	143
4	Bengkulu	2
5	DI Yogyakarta	17
6	DKI Jakarta	388
7	Gorontalo	8
8	Jambi	13
9	Jawa Barat	321
10	Jawa Tengah	96
11	Jawa Timur	269
12	Kalimantan Barat	17
13	Kalimantan Selatan	14
14	Kalimantan Tengah	14
15	Kalimantan Timur	39
16	Kalimantan Utara	6
17	Kepulauan Bangka Belitung	10
18	Kepulauan Riau	25
19	Lampung	19
20	Maluku	5
21	Maluku Utara	2
22	Nusa Tenggara Barat	14
23	Nusa Tenggara Timur	13
24	Papua	7
25	Papua Barat	1
26	Papua Barat Daya	10
27	Papua Selatan	1
28	Papua Tengah	1
29	Riau	72
30	Sulawesi Selatan	45
31	Sulawesi Tengah	5
32	Sulawesi Tenggara	7
33	Sulawesi Utara	13
34	Sumatera Barat	11
35	Sumatera Selatan	43
36	Sumatera Utara	105
Total		1.833

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.5 Data Kader Norma Ketenagakerjaan

Tabel 5.5. 1 Jumlah Kader Norma K3 Menurut Provinsi, Kabupaten/kota, dan Jenis Kelamin s.d. 30 September 2024

No.	Provinsi	Kab/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	1		1
2	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	10	8	18
3	Jawa Tengah	Kab. Jepara	2	2	4
4	Jawa Tengah	Kab. Sidoarjo		1	1
5	Jawa Tengah	Kota Semarang	3	3	6
Total			16	14	30

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.6 Data Perusahaan Penerima Penghargaan SMK3 dan Zero

Tabel 5.6. 1 Jumlah Perusahaan Penerima Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Menurut Provinsi dan Kategori Tingkat Penerapan Tahun 2024

No.	Provinsi	Kategori Tingkat Penerapan			Jumlah
		Awal (64 Kriteria)	Lanjutan (166 Kriteria)	Transisi (122 Kriteria)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	35	1	3	39
2	Bali	50	7	1	58
3	Banten	135	69	13	217
4	Bengkulu	1	2		3
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	8	5		13
6	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	3	1	5
7	DKI Jakarta	414	121	24	559
8	Gorontalo	7			7
9	Jambi	3	11	4	18
10	Jawa Barat	314	122	14	450
11	Jawa Tengah	77	42	8	127
12	Jawa Timur	202	114	23	339
13	Kalimantan Barat	13	6		19
14	Kalimantan Selatan	1	6		7
15	Kalimantan Tengah	4	11	1	16
16	Kalimantan Timur	15	15	4	34
17	Kalimantan Utara	1	1		2
18	Kalimantan Barat	5	3		8

No.	Provinsi	Kategori Tingkat Penerapan			Jumlah
		Awal (64 Kriteria)	Lanjutan (166 Kriteria)	Transisi (122 Kriteria)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Kalimantan Selatan	3	5	1	9
20	Kalimantan Tengah	2	4		6
21	Kalimantan Timur	11	7	2	20
22	Kalimantan Utara	2			2
23	Kep. Riau	1			1
24	Kepulauan Bangka Belitung	3	4		7
25	Kepulauan Riau	27	16	2	45
26	Kepulauan Bangka Belitung		1	1	2
27	Lampung	7	12	1	20
28	Maluku	4	4		8
29	Maluku Utara	5			5
30	Nusa Tenggara Barat	5	5	3	13
31	Nusa Tenggara Timur	11	2	3	16
32	Nusa Tenggara Barat	1	3		4
33	Nusa Tenggara Timur	4			4
34	Papua	9	1	1	11
35	Papua Barat	1			1
36	Papua Barat Daya	5		1	6
37	Papua Barat Daya	3			3
38	Papua Selatan		1		1
39	Papua Tengah	1	1		2

No.	Provinsi	Kategori Tingkat Penerapan			Jumlah
		Awal (64 Kriteria)	Lanjutan (166 Kriteria)	Transisi (122 Kriteria)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40	Riau	54	24	7	85
41	Sulawesi Selatan	33	16	1	50
42	Sulawesi Tengah	2	1		3
43	Sulawesi Tenggara	5	1		6
44	Sulawesi Utara	13	5		18
45	Sulawesi Tenggara	1		1	2
46	Sumatera Barat	8	4	2	14
47	Sumatera Selatan	21	23	1	45
48	Sumatera Utara	76	64	3	143
49	Sumatera Selatan	10	11	1	22
Total		1.614	754	127	2.495

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.7 Data Ahli K3

Tabel 5.7. 1 Jumlah Ahli Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) Menurut Spesialisasi s.d. 30 September 2024

No.	Spesialisasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	PAPA	187.653
2	PTP	11.912
3	PUBT	13.210
4	Pengelasan	4.675
5	Listrik	17.233
6	Elevator - Eskalator	3.543
7	Kebakaran	72.131
8	Konstruksi	13.714
9	Kesja	30.301
10	Ketinggian	52.820
11	LKBB	22.848
12	AK3U	69.326
13	SMK3	2.899
14	Penyelaman	275
Total		502.540

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Keterangan:

PAPA : Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

PTP : Pesawat Tenaga dan Produksi

PUBT : Pesawat Uap dan Bejana Tekan

Kesja : Kesehatan Kerja

LKBB : Lingkungan Kerja Bahan Berbahaya

AK3U : Ahli Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Umum

SMK3 : Sistem Manajemen dan Keselamatan & Kesehatan Kerja.

5.8 Data Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan

**Tabel 5.8.1. Jumlah Perusahaan yang Diperiksa
menurut Provinsi dan Kegiatan Pemeriksaan
s.d Triwulan II 2024**

No.	Provinsi	Kegiatan Pemeriksaan				Jumlah
		Pertama	Berkala	Ulang	Khusus	
1	Aceh	26	46	12	-	84
2	Sumatera Utara	115	223	14	132	484
3	Sumatera Barat	-	36	-	22	58
4	Riau	475	290	9	40	814
5	Jambi	96	142	72	-	310
6	Sumatera Selatan	21	22	3	1	47
7	Bengkulu	147	35	5	-	187
8	Lampung	40	6	-	-	46
9	Kep. Bangka Belitung	21	18	-	6	45
10	Kep. Riau	391	262	-	-	653
11	DKI Jakarta	134	34	-	38	206
12	Jawa Barat	614	1.561	-	178	2.353
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	58	210	-	47	315
15	Jawa Timur	384	346	-	-	730
16	Banten	1.058	822	-	46	1.926
17	Bali	98	538	-	-	636
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	285	-	-	285
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	333	-	-	-	333
22	Kalimantan Selatan	7	55	-	6	68
23	Kalimantan Timur	-	-	-	10	10
24	Kalimantan Utara	3	10	-	-	13
25	Sulawesi Utara	159	287	-	-	446
26	Sulawesi Tengah	-	57	-	-	57
27	Sulawesi Selatan	345	405	-	309	1.059
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	6	6
29	Gorontalo	-	17	13	-	30
30	Sulawesi Barat	36	50	-	-	86
31	Maluku	110	205	-	-	315
32	Maluku Utara	3	-	-	-	3
33	Papua Barat	908	160	-	-	1.068
34	Papua	-	-	-	-	-
Jumlah		5.582	6.122	128	841	12.673

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Keterangan:

- Jumlah berdasarkan data administratif yang dilaporkan di instansi ketenagakerjaan sesuai Permenakertrans Nomor 09/2005 Tabel K5

**Tabel 5.8.2. Jumlah Perusahaan yang Diperiksa
menurut Provinsi dan Kegiatan Pembinaan
s.d Triwulan II 2024**

No.	Provinsi	Kegiatan Pembinaan (Kali)			Jumlah
		NP. I	NP. II	NP. III	
1	Aceh	64	-	-	64
2	Sumatera Utara	124	-	-	124
3	Sumatera Barat		-	-	-
4	Riau	180	4	-	184
5	Jambi	92	-	-	92
6	Sumatera Selatan	10	4	-	14
7	Bengkulu	155	12	-	167
8	Lampung	51		-	51
9	Kep. Bangka Belitung	6	2	-	8
10	Kep. Riau	3		-	3
11	DKI Jakarta	183	7	-	190
12	Jawa Barat	265		-	265
13	Jawa Tengah	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	86	17	-	103
15	Jawa Timur	730	-	-	730
16	Banten	542	4	-	546
17	Bali	44	-	-	44
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	212	-	-	212
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	333	-	-	333
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	38	38	-	76
24	Kalimantan Utara	13	-	-	13
25	Sulawesi Utara	387	-	-	387
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	17	-	-	17
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	82	-	-	82
31	Maluku	125	-	-	125
32	Maluku Utara	1	-	-	1
33	Papua Barat	1.068	-	-	1.068
34	Papua	-	-	-	-
Jumlah		4.811	88	-	4.899

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Keterangan:

- Jumlah berdasarkan data administratif yang dilaporkan di instansi ketenagakerjaan sesuai Permenakertrans Nomor 09/2005 Tabel K5
- NP : Nota Pemeriksaan

**Tabel 5.8.3. Jumlah Perusahaan yang Melanggar Norma Ketenagakerjaan
menurut Provinsi dan Jenis Pelanggaran
s.d Triwulan II 2024**

No.	Provinsi	Perusahaan Melanggar	Perusahaan Yang Di Nota	Jenis Pelanggaran Ketenagakerjaan							
				WLK	WKWI	TKA	TKI	UMP	Upah Lembur	THR	Cuti Tahunan
1	Aceh	10	10	5	1	-	-	-	-	-	2
2	Sumatera Utara	41	8	21	13	3	-	44	14	1	-
3	Sumatera Barat	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	15	-	10	-	-	-	10	9	-	4
5	Jambi	82	67	98	45	-	-	16	28	1	6
6	Sumatera Selatan	399	9	147	-	-	-	3	3	-	-
7	Bengkulu	112	89	80	-	7	-	17	12	-	-
8	Lampung	21	-	-	-	-	-	4	4	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	17	6	8	6	-	-	3	8	2	-
10	Kep. Riau	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	195	191	63	-	20	10	19	11	7	-
12	Jawa Barat	1.693	1.330	604	77	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	917	812	598	54	2	-	91	64	4	20
14	DI Yogyakarta	70	70	30	9	1	-	20	6	-	1
15	Jawa Timur	316	316	179	119	-	-	133	197	-	-
16	Banten	481	177	69	13	12	-	47	7	-	-
17	Bali	30	30	10	5	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	49	-	-	-	-	-	-	-	2	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	4	-	-	-	3	3	3	-
21	Kalimantan Tengah	333	333	8	-	-	-	33	1	2	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	13	13	5	-	4	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	93	93	156	42	-	-	34	47	8	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	309	309	190	163	-	-	203	205	17	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	42	42	-	-	-	-	20	-	-	-
31	Maluku	130	130	85	9	-	-	29	-	-	33
32	Maluku Utara	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	513	513	279	110	6	-	156	67	1	208
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ditjen. Binwasnaker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5.912	4.554	2.652	666	55	10	885	686	56	274

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Lanjutan Tabel 5.8.3.

No.	Provinsi	Jenis Pelanggaran Ketenagakerjaan									Jumlah
		Cuti Haid	PP/ PKB	P4/ P4P	PWDB	PDSTK	PDSUph	PDSPrg	Perusahaan Menunggak	Lain-Lain	
1	Aceh	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	14	7	5	-	-	122
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	10	-	5	7	7	-	-	24	86
5	Jambi	-	-	1	-	1	-	-	-	1	197
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	1	1	1	-	-	156
7	Bengkulu	-	12	-	-	42	4	16	-	-	190
8	Lampung	-	-	-	-	-	1	4	6	5	24
9	Kep. Bangka Belitung	-	8	-	2	5	-	-	8	14	64
10	Kep. Riau	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
11	DKI Jakarta	2	24	6	4	59	11	1	41	128	406
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
13	Jawa Tengah	4	339	-	161	250	20	25	4	176	1.812
14	DI Yogyakarta	-	26	-	-	5	2	17	2	-	119
15	Jawa Timur	-	166	-	-	289	289	245	-	-	1.617
16	Banten	-	112	-	-	-	-	-	-	-	260
17	Bali	-	6	-	10	30	-	-	-	-	61
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	1	-	1	1	37	2	44
19	Nusa Tenggara Timur	-	4	-	-	-	-	2	-	-	6
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
21	Kalimantan Tengah	-	79	-	-	107	2	1	-	-	233
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	8	-	-	4	-	-	-	15	36
25	Sulawesi Utara	7	98	-	-	-	1	1	1	-	395
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	70	-	99	86	-	-	-	-	1.033
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	22	4	-	-	-	46
31	Maluku	-	-	-	57	-	-	15	-	-	228
32	Maluku Utara	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5
33	Papua Barat	180	175	-	1	1	-	-	-	266	1.450
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ditjen. Binwasnaker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		193	1.140	7	340	924	350	334	99	631	9.302

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Keterangan:

Jumlah berdasarkan data administratif yang dilaporkan di instansi ketenagakerjaan sesuai Permenakertrans Nomor 09/2005 Tabel K5

Keterangan:

- WLK : Wajib Laporkan Ketenagakerjaan
- WKWI : Waktu Kerja Waktu Istirahat
- TKA : Tenaga Kerja Asing
- TKI : Tenaga Kerja Indonesia
- UMP : Upah Minimum Indonesia
- THR : Tunjangan Hari Raya
- PP/PKB : Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama
- P4/P4P : Pelanggaran terhadap putusan yang telah ditetapkan melalui Pengadilan HI/Mediasi
- PWBD : Perusahaan Wajib Daftar
- PDSTK : Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja
- PDSUp : Perusahaan Daftar Sebagian Upah
- PDSPrg : Perusahaan Daftar Sebagian Program

5.9 Data Pelanggaran Tindak Pidana Ketenagakerjaan

Tabel 5.9 Jumlah Putusan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan menurut Provinsi dan Jenis Pelanggaran s.d Triwulan III Tahun 2024

No.	Provinsi	Jenis Pelanggaran										Jumlah
		Tipiring				Biasa						
		WLKP	PP	K3	UU 3/ 1951	Serikat Pekerja	Peng-upahan	Upah	Pesangon	PMI	BPJS	
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Babel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	8
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI. Yogyakarta	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ditjen. Binwasnaker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	1	9	1	-	-	-	-	-	-	12

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI, update sampai dengan 1 November 2024

Keterangan:

- Biasa : Proses Penyidikan Biasa
- Tipiring : Proses Penyidikan Cepat melalui Proses Tindak Pidana Ringan (Tipiring)
- WLKP : Pelanggaran Norma Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
- PP : Pelanggaran Norma Peraturan Perusahaan
- K3 : Pelanggaran Norma K3
- UU 3/1951 : Pelanggaran atas Undang-Undang Pengawasan Ketenagakerjaan
- Pengupahan : Pelanggaran Norma Pengupahan
- BPJS KK : Pelanggaran Norma JAMSOSTEK
- Hubker : Pelanggaran Norma Hubungan Kerja
- PMI : Pekerja Migran Indonesia

5.10 Data Obyek K3

**Tabel 5.10. Jumlah Objek Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
menurut Provinsi dan Jumlah Peralatan
s.d. Triwulan II Tahun 2024**

No.	Provinsi	Jumlah Peralatan						
		Pesawat Uap	Bejana Tekanan	Ps. Angkat/Angkut	Ps. Tenaga/Produksi	Listrik	Pencgh. Kebakaran	Kesehatan Kerja
1	Aceh	8	34	20	37	34	94	6
2	Sumatera Utara	225	560	914	821	1.376	1.157	-
3	Sumatera Barat	157	169	377	271	184	82	17
4	Riau	86	96	1.089	250	103	42	-
5	Jambi	62	167	223	270	297	138	33
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	64	90	93	98	91	96	12
8	Lampung	114	80	102	106	90	38	57
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	13	16	9	4
11	DKI Jakarta	4	5	6	7	8	9	10
12	Jawa Barat	200	564	1.141	561	905	1.792	55
13	Jawa Tengah	1.433	2.993	4.749	3.666	5.512	7.949	2.642
14	DI Yogyakarta	146	545	-	-	-	36.666	595
15	Jawa Timur	3.713	7.740	98.88	11.926	15.186	22.768	2.213
16	Banten	103	486	1.864	580	212	80	48
17	Bali	23	135	119	265	693	8.435	-
18	Nusa Tenggara Barat	18	185	269	3	28	12	-
19	Nusa Tenggara Timur	21		96	410	239	53	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	294	388	914	510	154	155	-
22	Kalimantan Selatan	178	11.870	1.341	517	3.334	437	241
23	Kalimantan Timur	847	1.337	7.161	1.742	957	331	9
24	Kalimantan Utara	60	80	686	162	95	-	-
25	Sulawesi Utara	42	521	447	862	1.028	786	232
26	Sulawesi Tengah	29	591	922	387	3.559	1.418	31
27	Sulawesi Selatan	41	81	131	189	269	25	8
28	Sulawesi Tenggara	35	219	-	-	-	1.024	149
29	Gorontalo	43	15	34	103	235	11	8
30	Sulawesi Barat	71	129	192	82	63	108	11
31	Maluku	-	7	431	246	3.531	4.402	4.144
32	Maluku Utara	11	249	87	419	1.689	550	25
33	Papua Barat	45	240	1.183	436	13	1.843	143
34	Papua	11	35	358	-	-	1.746	68
35	Ditjen. Binwasnaker	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		8.084	29.611	123.829	24.939	39.901	92.256	10.761

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Lanjutan Tabel 5.10.

No.	Provinsi	Jumlah Peralatan						Jumlah
		Konstr. Bangunan	Lingkungan Kerja	Sarana K3	Operator/ Teknisi/ Petugas K3	Perusahaan Jasa K3	Perancah Bangunan	
1	Aceh	-	1	15	213	-	-	462
2	Sumatera Utara	2	561	1.264	105	9	-	6.994
3	Sumatera Barat	13	49	90	317	7	-	1.733
4	Riau	-	-	715	348	22	-	2.751
5	Jambi	7	11	104	174	-	-	1.486
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	40	236	-	1	12	833
8	Lampung	-	-	-	123	-	-	710
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	4	6	10	12	-	74
11	DKI Jakarta	11	12	13	14	15	-	114
12	Jawa Barat	3	78	63	251	-	-	5.613
13	Jawa Tengah	579	1.631	912	1.238	13	-	33.317
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	37.952
15	Jawa Timur	387	2.332	2.923	4.894	419	328	173.709
16	Banten	-	29	-	22	-	-	3.424
17	Bali	-	-	-	-	3	-	9.673
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	515
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	5.134	12	-	-	5.965
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	10	-	-	-	-	2.425
22	Kalimantan Selatan	69	1.816	205	1.081	-	-	21.089
23	Kalimantan Timur	-	1	-	-	-	-	12.385
24	Kalimantan Utara	-	-	-	1.083	-	-	2.166
25	Sulawesi Utara	101	343	322	488	3	-	5.175
26	Sulawesi Tengah	159	58	1.451	178	-	-	8.783
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	74	9	-	827
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	1.427
29	Gorontalo	2	8	1	2	-	-	462
30	Sulawesi Barat	996	61	40	94	2	-	1.849
31	Maluku	43	206	104	146	159	-	13.419
32	Maluku Utara	96	78	1.805	-	-	-	5.009
33	Papua Barat	84	3	4	-	1	-	3.995
34	Papua	-	-	-	-	-	-	2.218
35	Ditjen. Binwasnaker	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2.552	7.332	15.407	10.867	675	340	366.554

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.11 Data Pengawas Ketenagakerjaan

**Tabel 5.11.1. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan
menurut Provinsi/ Unit Kerja dan Jenjang Jabatan
s.d Semester I Tahun 2024**

No.	Provinsi	Jenjang Jabatan				Jumlah
		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	
1	Aceh	4	17	2	-	23
2	Sumatera Utara	2	25	12	-	39
3	Sumatera Barat	3	17	14	-	34
4	Riau	8	16	13	1	38
5	Jambi	2	21	6	-	29
6	Sumatera Selatan	6	19	8	-	33
7	Bengkulu	5	10	9	-	24
8	Lampung	1	23	10	-	34
9	Kep. Bangka Belitung	2	22	3	-	27
10	Kep. Riau	4	30	3	-	37
11	DKI Jakarta	14	22	13	-	49
12	Jawa Barat	57	74	44	-	175
13	Jawa Tengah	18	75	52	-	145
14	DI Yogyakarta	3	7	11	-	21
15	Jawa Timur	32	78	48	-	158
16	Banten	25	27	19	-	71
17	Bali	2	9	10	-	21
18	Nusa Tenggara Barat	1	14	2	-	17
19	Nusa Tenggara Timur	3	13	1	-	17
20	Kalimantan Barat	11	15	1	-	27
21	Kalimantan Tengah	1	20	4	-	25
22	Kalimantan Selatan	13	20	3	-	36
23	Kalimantan Timur	4	34	11	-	49
24	Kalimantan Utara	6	1	1	-	8
25	Sulawesi Utara	-	16	13	1	30
26	Sulawesi Tengah	2	14	5	-	21
27	Sulawesi Selatan	1	27	23	-	51
28	Sulawesi Tenggara	-	15	3	-	18
29	Gorontalo	4	6	2	-	12
30	Sulawesi Barat	4	7	-	-	11
31	Maluku	12	5	1	-	18
32	Maluku Utara	-	6	-	-	6
33	Papua Barat	-	5	2	-	7
34	Papua Barat Daya	1	4	1	-	6
35	Papua	9	10	2	-	21
36	Papua Selatan	-	-	-	-	-
37	Papua Tengah	-	-	-	-	-
38	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
39	Ditjen. Binwasnaker	29	77	27	-	133
Jumlah		289	801	379	2	1.471

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

**Tabel 5.11.2. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan
menurut Provinsi/ Unit Kerja dan Jenis Kelamin
s.d Semester I Tahun 2024**

No.	Provinsi	Jenjang Jabatan		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Aceh	19	4	23
2	Sumatera Utara	25	14	39
3	Sumatera Barat	22	12	34
4	Riau	25	13	38
5	Jambi	23	6	29
6	Sumatera Selatan	26	7	33
7	Bengkulu	15	9	24
8	Lampung	28	6	34
9	Kep. Bangka Belitung	20	7	27
10	Kep. Riau	21	16	37
11	DKI Jakarta	31	18	49
12	Jawa Barat	124	51	175
13	Jawa Tengah	90	55	145
14	DI Yogyakarta	11	10	21
15	Jawa Timur	99	59	158
16	Banten	46	25	71
17	Bali	17	4	21
18	Nusa Tenggara Barat	12	5	17
19	Nusa Tenggara Timur	12	5	17
20	Kalimantan Barat	19	8	27
21	Kalimantan Tengah	20	5	25
22	Kalimantan Selatan	23	13	36
23	Kalimantan Timur	33	16	49
24	Kalimantan Utara	5	3	8
25	Sulawesi Utara	18	12	30
26	Sulawesi Tengah	13	8	21
27	Sulawesi Selatan	38	13	51
28	Sulawesi Tenggara	11	7	18
29	Gorontalo	10	2	12
30	Sulawesi Barat	5	6	11
31	Maluku	13	5	18
32	Maluku Utara	6	-	6
33	Papua Barat	4	3	7
34	Papua Barat Daya	6	-	6
35	Papua	11	10	21
36	Papua Selatan	-	-	-
37	Papua Tengah	-	-	-
38	Papua Pegunungan	-	-	-
39	Ditjen. Binwasnaker	68	65	133
Jumlah		969	502	1.471

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.12 Data Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

**Tabel 5.12.1. Jumlah Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
menurut Provinsi/ Unit Kerja, dan Jenjang Jabatan
s.d. Semester I Tahun 2024**

No.	Provinsi	Jenjang Jabatan Fungsional Penguji K3				Jumlah
		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	7	7	-	-	14
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	1	1	-	2
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	3	-	3
9	Kep. Bangka Belitung	2	-	-	-	2
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	6	5	5	-	16
12	Jawa Barat	11	7	5	-	23
13	Jawa Tengah	1	6	9	-	16
14	DI Yogyakarta	2	4	2	-	8
15	Jawa Timur	12	3	4	-	19
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	1	-	1
18	Nusa Tenggara Barat	1	1	-	-	2
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	1	2	1	-	4
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	5	2	2	-	9
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	1	-	-	1
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	7	11	5	-	23
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-
35	Ditjen. Binwasnaker & K3	10	15	6	-	31
Jumlah		65	65	44	-	174

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

**Tabel 5.12.2. Jumlah Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
menurut Provinsi/ Unit Kerja, dan Jenis Kelamin
s.d. Semester I Tahun 2024**

No.	Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Aceh	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-
3	Sumatera Barat	7	7	14
4	Riau	-	-	-
5	Jambi	-	-	-
6	Sumatera Selatan	2	-	2
7	Bengkulu	-	-	-
8	Lampung	2	1	3
9	Kep. Bangka Belitung	1	1	2
10	Kep. Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	6	10	16
12	Jawa Barat	7	16	23
13	Jawa Tengah	10	6	16
14	DI Yogyakarta	4	4	8
15	Jawa Timur	7	12	19
16	Banten	-	-	-
17	Bali	1	-	1
18	Nusa Tenggara Barat	1	1	2
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20	Kalimantan Barat	1	3	4
21	Kalimantan Tengah	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-
23	Kalimantan Timur	5	4	9
24	Kalimantan Utara	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	1	1
26	Sulawesi Tengah	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	9	14	23
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-
31	Maluku	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-
34	Papua	-	-	-
35	Ditjen. Binwasnaker & K3	11	20	31
Jumlah		74	100	174

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.13 Data Perusahaan yang Mendapat Uji K3

**Tabel 5.13. Perusahaan yang Mendapatkan Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
menurut Provinsi dan Skala Perusahaan
s.d. Semester I Tahun 2024**

No.	Provinsi	Skala Perusahaan				Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	4	4
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	1	-	-	1	2
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	2	-	9	14	25
12	Jawa Barat	3	4	14	71	92
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-
16	Banten	1	-	3	6	10
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	1	4	3	8
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-
35	Ditjen. Binwasnaker	-	-	-	-	-
Jumlah		7	5	30	99	141

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

BAB VI

KETENAGAKERJAAN UMUM

6.1. Penduduk Usia Kerja

**Tabel 6.1.1. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia
Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Utama
Februari 2024**

Provinsi	Jenis Kegiatan							Penduduk Usia Kerja
	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah	
Aceh	2.455.387	144.675	2.600.062	380.779	836.619	235.814	1.453.212	4.053.274
Sumatera Utara	7.592.278	407.681	7.999.959	882.565	1.995.091	501.697	3.379.353	11.379.312
Sumatera Barat	2.907.452	178.838	3.086.290	372.074	749.446	173.415	1.294.935	4.381.225
Riau	3.098.757	124.003	3.222.760	415.720	1.073.064	189.925	1.678.709	4.901.469
Jambi	1.773.536	82.581	1.856.117	262.178	554.722	93.554	910.454	2.766.571
Sumatera Selatan	4.375.447	181.013	4.556.460	473.274	1.235.848	266.746	1.975.868	6.532.328
Bengkulu	1.080.744	35.394	1.116.138	140.699	275.375	41.476	457.550	1.573.688
Lampung	4.836.334	207.704	5.044.038	505.052	1.306.174	198.311	2.009.537	7.053.575
Bangka-Belitung	787.140	31.486	818.626	79.693	238.989	21.245	339.927	1.158.553
Kepulauan Riau	1.003.393	74.775	1.078.168	145.775	324.885	57.023	527.683	1.605.851
DKI Jakarta	5.106.782	327.595	5.434.377	789.505	1.735.861	379.339	2.904.705	8.339.082
Jawa Barat	24.086.585	1.788.602	25.875.187	2.922.160	8.232.868	1.395.811	12.550.839	38.426.026
Jawa Tengah	20.409.224	937.699	21.346.923	2.308.207	4.722.521	1.182.115	8.212.843	29.559.766
D I Yogyakarta	2.133.609	71.330	2.204.939	219.584	487.460	101.000	808.044	3.012.983
Jawa Timur	23.236.078	902.348	24.138.426	2.261.038	5.481.378	1.178.227	8.920.643	33.059.069
Banten	5.625.335	424.690	6.050.025	743.460	2.087.149	434.626	3.265.235	9.315.260
Bali	2.662.802	50.683	2.713.485	250.148	440.240	103.057	793.445	3.506.930
Nusa Tenggara Barat	2.930.313	100.152	3.030.465	286.141	632.360	148.103	1.066.604	4.097.069
Nusa Tenggara Timur	2.963.778	96.938	3.060.716	303.835	438.534	183.905	926.274	3.986.990
Kalimantan Barat	2.756.918	120.789	2.877.707	367.297	787.511	210.334	1.365.142	4.242.849
Kalimantan Tengah	1.379.832	52.509	1.432.341	180.895	430.954	67.445	679.294	2.111.635
Kalimantan Selatan	2.098.388	84.913	2.183.301	241.200	606.408	108.158	955.766	3.139.067
Kalimantan Timur	1.893.994	115.523	2.009.517	312.634	605.762	102.493	1.020.889	3.030.406
Kalimantan Utara	344.064	14.386	358.450	61.639	105.134	30.324	197.097	555.547
Sulawesi Utara	1.257.188	79.926	1.337.114	163.428	462.740	126.452	752.620	2.089.734
Sulawesi Tengah	1.525.658	49.624	1.575.282	176.400	446.823	100.088	723.311	2.298.593
Sulawesi Selatan	4.477.301	230.674	4.707.975	653.139	1.534.924	301.828	2.489.891	7.197.866
Sulawesi Tenggara	1.355.014	45.034	1.400.048	183.028	370.207	57.005	610.240	2.010.288
Gorontalo	633.463	19.918	653.381	74.157	172.125	27.359	273.641	927.022
Sulawesi Barat	749.904	23.379	773.283	80.654	172.109	53.536	306.299	1.079.582
Maluku	892.547	56.537	949.084	146.651	273.305	74.343	494.299	1.443.383
Maluku Utara	642.047	27.857	669.904	92.587	163.374	61.035	316.996	986.900
Papua Barat	304.467	13.702	318.169	36.706	56.324	12.457	105.487	423.656
Papua Barat Daya	295.276	18.929	314.205	42.731	91.530	17.362	151.623	465.828
Papua	480.381	29.634	510.015	55.747	108.129	39.445	203.321	713.336
Papua Selatan	210.289	10.483	220.772	32.024	58.445	16.698	107.167	327.939
Papua Tengah	819.313	20.901	840.214	57.606	133.254	60.201	251.061	1.091.275
Papua Pegunungan	998.028	11.957	1.009.985	39.545	71.527	32.861	143.933	1.153.918

Jumlah	142.179.046	7.194.862	149.373.908	16.739.955	39.499.169	8.384.813	64.623.937	213.997.845
--------	-------------	-----------	-------------	------------	------------	-----------	------------	-------------

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2024, diolah Pusdatik

**Tabel 6.1.2. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia
Menurut Provinsi dan Keikutsertaan Pelatihan
Februari 2024**

Provinsi	Keikutsertaan Pelatihan dan Mendapatkan Sertifikat			Jumlah
	Pernah Pelatihan dan Mendapatkan Sertifikat	Pernah Pelatihan dan Tidak Mendapatkan Sertifikat	Tidak Pernah Mengikuti Pelatihan	
Aceh	395.274	169.258	3.488.742	4.053.274
Sumatera Utara	1.482.722	633.548	9.263.042	11.379.312
Sumatera Barat	689.423	215.511	3.476.291	4.381.225
Riau	710.632	183.360	4.007.477	4.901.469
Jambi	314.209	84.112	2.368.250	2.766.571
Sumatera Selatan	683.363	239.043	5.609.922	6.532.328
Bengkulu	247.973	78.486	1.247.229	1.573.688
Lampung	719.583	215.070	6.118.922	7.053.575
Bangka-Belitung	181.564	35.589	941.400	1.158.553
Kepulauan Riau	257.520	55.819	1.292.512	1.605.851
DKI Jakarta	2.173.588	555.613	5.609.881	8.339.082
Jawa Barat	5.105.430	1.690.216	31.630.380	38.426.026
Jawa Tengah	3.738.732	1.531.831	24.289.203	29.559.766
D I Yogyakarta	744.811	187.902	2.080.270	3.012.983
Jawa Timur	3.590.280	879.325	28.589.464	33.059.069
Banten	1.070.222	159.588	8.085.450	9.315.260
Bali	926.871	122.631	2.457.428	3.506.930
Nusa Tenggara Barat	532.158	226.767	3.338.144	4.097.069
Nusa Tenggara Timur	419.421	149.260	3.418.309	3.986.990
Kalimantan Barat	432.582	150.386	3.659.881	4.242.849
Kalimantan Tengah	237.878	62.909	1.810.848	2.111.635
Kalimantan Selatan	591.943	135.308	2.411.816	3.139.067
Kalimantan Timur	704.824	86.503	2.239.079	3.030.406
Kalimantan Utara	111.541	15.273	428.733	555.547
Sulawesi Utara	313.353	95.946	1.680.435	2.089.734
Sulawesi Tengah	212.088	67.949	2.018.556	2.298.593
Sulawesi Selatan	1.183.603	270.419	5.743.844	7.197.866
Sulawesi Tenggara	280.377	85.278	1.644.633	2.010.288
Gorontalo	143.404	35.893	747.725	927.022
Sulawesi Barat	143.778	32.467	903.337	1.079.582
Maluku	172.603	44.350	1.226.430	1.443.383
Maluku Utara	101.904	34.489	850.507	986.900
Papua Barat	59.733	15.488	348.435	423.656
Papua Barat Daya	66.766	27.611	371.451	465.828
Papua	154.514	34.416	524.406	713.336
Papua Selatan	32.824	8.841	286.274	327.939
Papua Tengah	36.091	4.726	1.050.458	1.091.275
Papua Pegunungan	21.468	5.327	1.127.123	1.153.918
Jumlah	28.985.050	8.626.508	176.386.287	213.997.845

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2024, diolah Pusdatik

**Tabel 6.1.3. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia
Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin
Februari 2024**

Jenis Kegiatan	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Bekerja	85.966.422	56.212.624	142.179.046
Pengangguran	4.484.848	2.710.014	7.194.862
Sekolah	8.113.888	8.626.067	16.739.955
Mengurus Rumah Tangga	3.425.132	36.074.037	39.499.169
Lainnya	5.663.140	2.721.673	8.384.813
Jumlah	107.653.430	106.344.415	213.997.845

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2024, diolah Pusdatik

**Tabel 6.1.4. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia
Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Daerah Tempat Tinggal
Februari 2024**

Jenis Kegiatan	Klasifikasi Perkotaan/Perdesaan		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	
Bekerja	80.707.673	61.471.373	142.179.046
Pengangguran	5.050.492	2.144.370	7.194.862
Sekolah	10.708.326	6.031.629	16.739.955
Mengurus Rumah Tangga	24.957.857	14.541.312	39.499.169
Lainnya	5.303.748	3.081.065	8.384.813
Jumlah	126.728.096	87.269.749	213.997.845

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2024, diolah Pusdatik

**Tabel 6.1.5. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia
Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan
Februari 2024**

Jenis Kegiatan	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan						Jumlah
	<=SD	SLTP	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	Diploma I/II/III/	DIV/S1/S2/S3	
Bekerja	51.953.221	25.808.289	29.220.285	17.185.456	3.395.566	14.616.229	142.179.046
Pengangguran	1.265.448	1.154.255	2.107.781	1.621.672	173.846	871.860	7.194.862
Sekolah	2.756.082	10.743.656	2.624.020	530.879	6.587	78.731	16.739.955
Mengurus Rumah Tangga	16.904.783	7.659.458	8.420.997	3.266.673	1.003.756	2.243.502	39.499.169
Lainnya	4.803.701	1.080.128	1.371.644	460.828	147.817	520.695	8.384.813
Jumlah	77.683.235	46.445.786	43.744.727	23.065.508	4.727.572	18.331.017	213.997.845

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2024, diolah Pusdatik

**Tabel 6.1.6. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia
Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Keikutsertaan Pelatihan
Februari 2024**

Jenis Kegiatan	Keikutsertaan Pelatihan dan Mendapatkan Sertifikat			Jumlah
	Pernah Pelatihan dan Mendapatkan Sertifikat	Pernah Pelatihan dan Tidak Mendapatkan Sertifikat	Tidak Pernah Mengikuti Pelatihan	
Bekerja	22.275.095	6.520.826	113.383.125	142.179.046
Pengangguran	1.305.680	306.699	5.582.483	7.194.862
Sekolah	992.381	372.555	15.375.019	16.739.955
Mengurus Rumah Tangga	3.668.637	1.225.409	34.605.123	39.499.169
Lainnya	743.257	201.019	7.440.537	8.384.813
Jumlah	28.985.050	8.626.508	176.386.287	213.997.845

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2024, diolah Pusdatik

**Tabel 6.1.7. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia
Menurut Kelompok Umur Jenis Kegiatan Utama
Februari 2024**

Kelompok Umur	Jenis Kegiatan							Penduduk Usia Kerja
	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah	
15 - 19	4.793.947	1.034.119	5.828.066	14.330.701	1.118.209	845.911	16.294.821	22.122.887
20 - 24	13.629.983	2.584.181	16.214.164	2.306.243	2.982.367	784.753	6.073.363	22.287.527
25 - 29	16.296.438	1.286.712	17.583.150	89.377	4.465.906	377.833	4.933.116	22.516.266
30 - 34	16.539.766	624.915	17.164.681	11.467	4.654.382	292.508	4.958.357	22.123.038
35 - 39	16.930.409	432.530	17.362.939	1.418	3.976.026	179.179	4.156.623	21.519.562
40 - 44	16.379.755	343.439	16.723.194	-	3.615.213	154.734	3.769.947	20.493.141
45 - 49	15.548.307	312.391	15.860.698	412	3.193.414	211.826	3.405.652	19.266.350
50 - 54	13.596.816	208.089	13.804.905	337	2.994.904	311.469	3.306.710	17.111.615
55 - 59	10.935.536	165.940	11.101.476	-	2.997.527	543.142	3.540.669	14.642.145
60 - 64	7.836.734	84.204	7.920.938	-	3.028.984	835.815	3.864.799	11.785.737
65 +	9.691.355	118.342	9.809.697	-	6.472.237	3.847.643	10.319.880	20.129.577
Jumlah	142.179.046	7.194.862	149.373.908	16.739.955	39.499.169	8.384.813	64.623.937	213.997.845

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2024, diolah Pusdatik

6.2. Penduduk yang Bekerja

**Tabel 6.2.1. Penduduk yang Bekerja di Indonesia
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
Februari 2024**

Status Pekerjaan Utama	Jenis kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	17.439.413	11.669.123	29.108.536
Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	15.509.746	6.931.356	22.441.102
Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	3.997.793	1.008.249	5.006.042
Buruh/karyawan/pegawai	34.125.837	18.918.825	53.044.662
Pekerja bebas di pertanian	3.613.733	1.879.132	5.492.865
Pekerja bebas di nonpertanian	5.859.224	1.185.713	7.044.937
Pekerja keluarga/tidak dibayar	5.420.676	14.620.226	20.040.902
Jumlah	85.966.422	56.212.624	142.179.046

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2024, diolah Pusdatik

**Tabel 6.2.2. Penduduk yang Bekerja di Indonesia
Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
Februari 2024**

Jenis Pekerjaan Utama	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	487.736	12.659	500.395
Manajer	2.148.209	1.085.426	3.233.635
Profesional	3.221.902	5.230.732	8.452.634
Teknisi dan Asisten Profesional	2.696.778	1.357.099	4.053.877
Tenaga Tata Usaha	3.766.836	3.018.667	6.785.503
Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan	16.564.225	19.080.935	35.645.160
Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.872.508	10.369.840	30.242.348
Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan YBDI	10.741.936	5.136.765	15.878.701
Operator dan Perakit Mesin	8.065.453	1.149.230	9.214.683
Pekerja Kasar	18.400.839	9.771.271	28.172.110
Jumlah	85.966.422	56.212.624	142.179.046

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2024, diolah Pusdatik

**Tabel 6.2.3. Penduduk yang Bekerja di Indonesia
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
Februari 2024**

Lapangan Usaha (KBLI 2020)	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A Pertanian, Kehutanan & Perikanan	25.694.485	15.026.474	40.720.959
B Pertambangan & Penggalian	1.613.942	88.614	1.702.556
C Industri Pengolahan	10.803.420	8.076.971	18.880.391
D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas & Udara Dingin	325.317	35.680	360.997
E Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment & Pemulihan Material Sampah, & Aktivitas Remediasi	468.868	106.573	575.441
F Konstruksi	8.493.803	151.463	8.645.266
G Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	14.239.787	12.845.908	27.085.695
H Pengangkutan & Pergudangan	5.529.135	371.216	5.900.351
I Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	4.525.693	6.583.134	11.108.827
J Informasi & Komunikasi	843.055	387.725	1.230.780
K Aktivitas Keuangan & Asuransi	1.042.725	595.762	1.638.487
L Real Estat	312.178	167.724	479.902
M,N Jasa Profesional & Perusahaan	1.654.862	559.881	2.214.743
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3.740.702	1.725.066	5.465.768
P Pendidikan	2.658.768	4.600.437	7.259.205
Q Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	962.045	1.535.514	2.497.559
R,S,T,U Jasa Lainnya	3.057.637	3.354.482	6.412.119
Jumlah	85.966.422	56.212.624	142.179.046

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2024, diolah Pusdatik

6.3. Pengangguran Terbuka

**Tabel 6.3.1. Pengangguran Terbuka di Indonesia
Menurut Provinsi dan Kategori Pengangguran
Februari 2024**

Provinsi	Kategori pengangguran terbuka				Jumlah
	mencari pekerjaan	mempersiapkan usaha	putus asa/ merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan	sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja	
Aceh	116.447	1.376	9.814	17.038	144.675
Sumatera Utara	344.725	17.364	29.455	16.137	407.681
Sumatera Barat	135.792	4.420	32.798	5.828	178.838
Riau	87.449	6.039	22.561	7.954	124.003
Jambi	41.943	4.420	27.890	8.328	82.581
Sumatera Selatan	137.608	6.735	21.568	15.102	181.013
Bengkulu	19.739	752	14.903	-	35.394
Lampung	187.906	6.364	10.400	3.034	207.704
Bangka-Belitung	27.919	2.109	-	1.458	31.486
Kepulauan Riau	66.689	718	5.546	1.822	74.775
DKI Jakarta	304.495	9.105	13.995	-	327.595
Jawa Barat	1.510.685	74.379	115.617	87.921	1.788.602
Jawa Tengah	733.747	50.060	130.857	23.035	937.699
D I Yogyakarta	50.029	4.854	14.425	2.022	71.330
Jawa Timur	797.510	29.799	44.276	30.763	902.348
Banten	401.440	2.844	13.438	6.968	424.690
Bali	26.360	532	20.937	2.854	50.683
Nusa Tenggara Barat	72.983	1.917	17.381	7.871	100.152
Nusa Tenggara Timur	69.461	2.057	18.436	6.984	96.938
Kalimantan Barat	70.329	820	34.211	15.429	120.789
Kalimantan Tengah	39.669	2.050	4.868	5.922	52.509
Kalimantan Selatan	68.505	3.310	11.203	1.895	84.913
Kalimantan Timur	95.337	276	14.965	4.945	115.523
Kalimantan Utara	10.616	380	342	3.048	14.386
Sulawesi Utara	64.990	4.236	6.802	3.898	79.926
Sulawesi Tengah	35.602	2.414	11.025	583	49.624
Sulawesi Selatan	158.844	11.015	46.268	14.547	230.674
Sulawesi Tenggara	24.802	2.011	14.336	3.885	45.034
Gorontalo	17.884	742	919	373	19.918
Sulawesi Barat	18.342	242	3.022	1.773	23.379
Maluku	40.456	3.633	9.405	3.043	56.537
Maluku Utara	23.725	1.677	1.008	1.447	27.857
Papua Barat	10.258	1.062	1.375	1.007	13.702
Papua Barat Daya	14.758	2.762	1.409	-	18.929
Papua	15.996	523	11.214	1.901	29.634
Papua Selatan	4.067	405	1.407	4.604	10.483
Papua Tengah	10.403	5.206	3.835	1.457	20.901
Papua Pegunungan	10.374	184	1.025	374	11.957
Jumlah	5.867.884	268.792	742.936	315.250	7.194.862

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2024, diolah Pusdatik

**Tabel 6.3.2. Pengangguran Terbuka di Indonesia
Menurut Pendidikan dan Kategori Pengangguran
Februari 2024**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Kategori pengangguran terbuka				Jumlah
	mencari pekerjaan	mempersiapkan usaha	putus asa/ merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan	sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja	
<=SD	873.921	59.381	263.839	68.307	1.265.448
SLTP	893.215	62.566	156.937	41.537	1.154.255
SLTA Umum	1.747.950	84.254	190.495	85.082	2.107.781
SLTA Kejuruan	1.439.501	32.678	94.356	55.137	1.621.672
Diploma I/II/III/	142.373	6.853	11.169	13.451	173.846
DIV/S1/S2/S3	770.924	23.060	26.140	51.736	871.860
Jumlah	5.867.884	268.792	742.936	315.250	7.194.862

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2024, diolah Pusdatik